

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ruang publik merupakan elemen fundamental dalam kehidupan masyarakat perkotaan karena menjadi wadah utama berlangsungnya berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas warga<sup>1</sup>. Keberadaan ruang publik yang memadai mencerminkan komitmen kota dalam menjamin hak warganya atas ruang yang aman, nyaman, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks perkotaan yang padat dan kompleks seperti Jakarta, ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan, termasuk sirkulasi udara, pengendalian limpasan air hujan, serta estetika ruang kota<sup>2</sup>. Oleh karena itu, kualitas ruang publik menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan tata kelola kota yang berorientasi pada kesejahteraan warganya.

Dinamika perkembangan kota modern menunjukkan bahwa keberadaan ruang publik semakin menghadapi tekanan struktural akibat pertumbuhan urbanisasi yang pesat. Indonesia mengalami peningkatan urbanisasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, di mana lebih dari separuh penduduk kini tinggal di wilayah perkotaan. Urbanisasi tidak hanya meningkatkan kebutuhan hunian dan

---

<sup>1</sup> Stephen Carr, Mark Francis, Leanne G. Rivlin, dan Andrew M. Stone, *Public Space* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), hlm. 1-3.

<sup>2</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik* (Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2019), hlm. 3-5.

infrastruktur ekonomi, tetapi juga memperbesar kompetisi penggunaan ruang kota. Dalam situasi tersebut, ruang publik sering kali menjadi sektor yang paling rentan terpinggirkan karena dianggap tidak menghasilkan nilai ekonomi langsung dibandingkan ruang komersial atau pembangunan fisik lainnya. Akibatnya, banyak ruang publik mengalami penyempitan, degradasi kualitas, hingga perubahan fungsi secara bertahap.

Jakarta sebagai pusat metropolitan nasional menjadi contoh nyata kompleksitas persoalan ruang publik perkotaan. Tingginya kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi yang intens, serta keterbatasan lahan menyebabkan tekanan besar terhadap ketersediaan ruang bersama warga. Berdasarkan kebijakan nasional penataan ruang, kota ideal seharusnya memiliki minimal 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari total luas wilayah<sup>3</sup>. Akan tetapi, ketersediaan RTH di Jakarta masih berada di bawah standar tersebut, sehingga ruang publik alternatif seperti trotoar, taman lingkungan, dan ruang terbuka informal menjadi semakin penting bagi aktivitas sosial masyarakat. Ketika ruang publik formal terbatas, masyarakat cenderung memanfaatkan ruang yang tersedia secara fleksibel sesuai kebutuhan sehari-hari, meskipun sering kali bertentangan dengan fungsi awal ruang tersebut.

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 29.

**Tabel 1. 1 Mapping Alihfungsi Ruang Publik di Jakarta**

| Jenis Ruang Publik                                                | Bentuk Alih Fungsi                                                                                                                               | Dampak |          |         | Sumber                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                                                                  | Sosial | Ekologis | Ekonomi |                                                                             |
| Trotoar Pasar Induk                                               | Tempat Penampungan sampah                                                                                                                        | ✓      | ✓        |         | <a href="https://megapolitan.kompas.com">https://megapolitan.kompas.com</a> |
| Trotoar dan Taman Kota di Daan Mogot                              | Disalahgunakan sebagai lokasi prostitusi malam hari di area gelap bantaran kali                                                                  | ✓      | ✓        |         | <a href="https://news.detik.com">https://news.detik.com</a>                 |
| Trotoar di Jakarta Selatan                                        | Disalahgunakan sebagai area parkir sampai menghalangi jalur pejalan kaki dan penyandang disabilitas                                              | ✓      |          | ✓       | <a href="https://news.detik.com">https://news.detik.com</a>                 |
| Halte Transportasi Publik                                         | Disalahgunakan sebagai area pedagang kaki lima                                                                                                   | ✓      |          | ✓       | <a href="https://andalasnews.com/news/">https://andalasnews.com/news/</a>   |
| Ruang Publik (jalan, jembatan, pohon kota, tembok fasilitas umum) | Polusi visual akibat pemasangan iklan liar, banner di pohon, coretan vandalisme, dan kabel utilitas yang semrawut sehingga merusak estetika kota | ✓      | ✓        | ✓       | <a href="https://isknews.com/">https://isknews.com/</a>                     |

Sumber : Analisis Peneliti dari Media Online, 2026

Berbagai kasus alihfungsi ruang publik yang ditunjukkan pada tabel di atas memperlihatkan bahwa ruang publik di kawasan perkotaan sering mengalami perubahan fungsi akibat tekanan aktivitas ekonomi, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan ruang kota yang tersedia bagi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang publik tidak selalu digunakan sesuai dengan tujuan awalnya sebagai ruang bersama yang terbuka, aman, dan dapat diakses secara setara oleh seluruh

warga. Dalam banyak kasus, ruang publik justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, seperti aktivitas ekonomi informal, parkir kendaraan, pembuangan sampah, hingga aktivitas yang meresahkan masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya menurunkan kualitas ruang publik, tetapi juga berpotensi menghilangkan fungsi sosial ruang sebagai tempat interaksi warga kota<sup>4</sup>.

Dalam perspektif teori ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas, ruang publik seharusnya menjadi arena di mana warga dapat berinteraksi secara bebas, setara, dan rasional untuk membahas persoalan bersama tanpa dominasi kepentingan tertentu<sup>5</sup>. Namun, realitas yang terjadi di berbagai ruang publik perkotaan menunjukkan adanya distorsi terhadap fungsi ideal tersebut. Ketika ruang publik mengalami alihfungsi yang tidak terkontrol, maka ruang tersebut tidak lagi sepenuhnya menjadi ruang diskusi dan interaksi sosial warga, melainkan berubah menjadi ruang yang didominasi oleh kepentingan ekonomi, praktik informal, atau bahkan aktivitas yang bertentangan dengan norma sosial masyarakat<sup>6</sup>.

Salah satu bentuk ruang publik yang paling dekat dan paling sering digunakan oleh masyarakat urban adalah trotoar<sup>7</sup>. Trotoar dirancang sebagai jalur primer bagi pejalan kaki yang memungkinkan mobilitas non-kendaraan secara

---

<sup>4</sup> Kompas.com, "Trotoar di Jakarta Selatan Jadi Tempat Parkir Kendaraan," diakses dari <https://megapolitan.kompas.com>

<sup>5</sup> Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (Cambridge: MIT Press, 1991).

<sup>6</sup> Luke Goode, *Jürgen Habermas: Democracy and the Public Sphere* (London: Pluto Press, 2005).

<sup>7</sup> Sugiono Soetomo, *Ruang Publik dan Interaksi Sosial Perkotaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 22-25.



aman dan nyaman, sekaligus berfungsi sebagai elemen pendukung ekologi kota melalui kemampuan menyerap air hujan dan menjaga keseimbangan mikroklimat<sup>8</sup>. Dalam perencanaan kota yang ideal, trotoar juga memiliki fungsi sosial sebagai ruang transisi yang memungkinkan terjadinya interaksi ringan antarwarga. Namun, dalam praktiknya, trotoar di banyak kota besar Indonesia sering kali tidak mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal akibat berbagai bentuk gangguan dan penyalahgunaan ruang yang terjadi secara berulang dan masif<sup>9</sup>. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan normatif ruang publik dan realitas pemanfaatannya di lapangan<sup>10</sup>.

Fenomena alihfungsi trotoar menjadi salah satu persoalan krusial dalam pengelolaan ruang publik perkotaan. Alihfungsi ini terjadi ketika jalur pejalan kaki digunakan untuk kepentingan lain di luar fungsi utamanya, seperti aktivitas perdagangan kaki lima, parkir kendaraan bermotor, fasilitas usaha, maupun aktivitas informal lain yang tidak diatur secara memadai<sup>11</sup>. Sejumlah studi dan laporan media menunjukkan bahwa alihfungsi trotoar telah menjadi masalah struktural di Jakarta, di mana sebagian besar trotoar tidak dapat digunakan secara optimal oleh pejalan kaki. Bahkan, laporan menyebutkan bahwa hampir 90 persen trotoar di Jakarta mengalami okupasi ilegal oleh berbagai aktivitas non-pejalan

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Bina Marga, *Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki* (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2014), hlm. 5-8.

<sup>9</sup> R. B. Widodo, "Alih Fungsi Trotoar sebagai Dampak Lemahnya Penataan Ruang Perkotaan," *Jurnal Tata Kota dan Daerah* 8, no. 2 (2016): 101-109.

<sup>10</sup> Henri Lefebvre, *The Production of Space*, terj. Donald Nicholson-Smith (Oxford: Blackwell, 1991), hlm. 38-40.

<sup>11</sup> Putri, Dwi Anggraini, "Trotoar sebagai Ruang Publik dan Permasalahannya di Kota Besar," *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 29, no. 1 (2018): 45-56.

kaki, sehingga menghilangkan hak dasar warga untuk bergerak secara aman di ruang publik<sup>12</sup>.

Bentuk alihfungsi yang semakin mengkhawatirkan adalah penggunaan trotoar sebagai tempat pembuangan sampah secara sembarangan. Praktik ini terjadi ketika trotoar dijadikan lokasi pembuangan limbah rumah tangga maupun komersial tanpa pengelolaan yang jelas, baik oleh warga sekitar maupun pelaku aktivitas ekonomi informal. Akibatnya, trotoar tidak hanya kehilangan fungsi mobilitasnya, tetapi juga berubah menjadi sumber pencemaran lingkungan<sup>13</sup>. Kasus penumpukan sampah di trotoar Pasar Waru, Koja, Jakarta Utara, misalnya, menunjukkan bagaimana ruang pejalan kaki dipenuhi sampah setinggi puluhan sentimeter yang menimbulkan bau menyengat, mengganggu aktivitas warga, serta menciptakan kondisi lingkungan yang tidak sehat<sup>14</sup>. Fenomena ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran kolektif terhadap fungsi ruang publik.

Alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah membawa dampak ekologis yang signifikan bagi lingkungan perkotaan. Sampah yang menumpuk dapat menyumbat saluran drainase, menghambat infiltrasi air hujan ke dalam tanah, serta mempercepat terjadinya genangan dan banjir lokal<sup>15</sup>. Selain itu, akumulasi

<sup>12</sup> Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, *Laporan Kondisi Trotoar di DKI Jakarta* (Jakarta: ITDP Indonesia, 2019), hlm. 6.

<sup>13</sup> Waringin Margi Yusmaman, Herri Widiyanto, Siti Nur Rohmah, dan Muhammad Ali Akbarsyah, "Bahaya Lingkungan pada *Open Dumping* Sampah Organik Perkotaan," *Jurnal Bengawan Solo* 2, no. 2 (2023): 83-92, <https://doi.org/10.58684/jbs.v2i2.83>

<sup>14</sup> "Trotoar Pasar Waru Dipenuhi Sampah, Pejalan Kaki Terpaksa ke Jalan Raya," *Kompas.com*, 14 Juli 2023.

<sup>15</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga, 2018), hlm. 3-5.

limbah organik dan anorganik di ruang terbuka berkontribusi terhadap pencemaran tanah dan udara, serta menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit seperti nyamuk dan tikus<sup>16</sup>. Studi-studi tentang pengelolaan sampah di kawasan perkotaan menunjukkan bahwa praktik pembuangan sampah sembarangan di ruang publik berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan mikro dan kesehatan masyarakat, meskipun kajian yang secara spesifik menyoroti trotoar masih relatif terbatas<sup>17</sup>.

Persoalan alihfungsi trotoar ini juga tidak dapat dilepaskan dari masalah kelembagaan dan tata kelola ruang publik. Di Jakarta, berbagai upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima, parkir liar, dan penyalahgunaan trotoar telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Satpol PP<sup>18</sup>. Namun, fakta bahwa praktik ini terus berulang menunjukkan bahwa pengelolaan ruang publik masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan, seperti lemahnya koordinasi antarinstitusi, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ruang bersama<sup>19</sup>. Penertiban PKL dan parkir liar di sejumlah wilayah Jakarta Barat menjadi bukti bahwa permasalahan ini bersifat struktural dan memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

---

<sup>16</sup> World Health Organization (WHO), *Solid Waste Management and Health* (Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2016), hlm. 12-15.

<sup>17</sup> Waringin Margi Yushman dkk., "Bahaya Lingkungan pada Open Dumping Sampah Organik Perkotaan," *Jurnal Bengawan Solo* Vol. 2 No. 2 (2023): 1-10, <https://doi.org/10.58684/jbs.v2i2.83>

<sup>18</sup> Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, *Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum* (Jakarta: Pemprov DKI Jakarta, 2007).

<sup>19</sup> Deden Rukmana, "The Politics of Urban Space and Informality in Jakarta," *Cities* Vol. 29 No. 6 (2012): 447-457.

Dalam konteks ekologis perkotaan, keberadaan sampah di trotoar juga berkontribusi terhadap kerusakan spasial yang lebih luas. Trotoar yang tertutup sampah kehilangan kemampuannya dalam mendukung fungsi ekologis dasar, seperti penyerapan panas dan air, sehingga berpotensi memperparah fenomena *urban heat island* di kawasan perkotaan<sup>20</sup>. Selain itu, degradasi estetika ruang publik akibat sampah dapat menurunkan kualitas visual kota dan berdampak pada kenyamanan psikologis warga<sup>21</sup>. Kondisi ini menunjukkan bahwa alihfungsi trotoar bukan hanya persoalan teknis tata kota, tetapi juga persoalan ekologis dan sosial yang saling berkaitan dan memperburuk kualitas hidup masyarakat perkotaan secara keseluruhan.

Khususnya di kawasan Jembatan Pelangi, Jakarta Barat, fenomena trotoar yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah menjadi contoh konkret bagaimana ruang publik kehilangan fungsi dasarnya. Trotoar yang seharusnya menjadi jalur aman bagi pejalan kaki justru tertutup oleh sampah, memaksa warga berjalan di badan jalan yang padat kendaraan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan kegagalan fungsi ruang publik, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses ruang kota yang aman dan layak bagi warga, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Urgensi penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian empiris di Indonesia yang secara khusus menghubungkan alihfungsi trotoar sebagai tempat

---

<sup>20</sup> Tim Oke, *Boundary Layer Climates* (London: Routledge, 2002), hlm. 270-276.

<sup>21</sup> Setha M. Low, *On the Plaza: The Politics of Public Space and Culture* (Austin: University of Texas Press, 2000), hlm. 33-36.



pembuangan sampah dengan dampak ekologis ruang publik. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek ketertiban, kenyamanan, mobilitas pejalan kaki, serta konflik penggunaan ruang publik, sementara dimensi ekologis dan kesehatan lingkungan masih kurang mendapat perhatian<sup>22</sup>. Padahal, kerusakan ekologis yang muncul akibat penumpukan sampah di trotoar berkontribusi langsung terhadap penurunan kualitas lingkungan perkotaan, terganggunya fungsi ruang publik, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat kota<sup>23</sup>.

Kajian mengenai ruang publik selama ini umumnya menempatkan trotoar sebagai bagian dari infrastruktur mobilitas dan ruang interaksi sosial masyarakat perkotaan. Dalam perspektif ruang publik, trotoar dipahami tidak hanya sebagai jalur pejalan kaki, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memungkinkan masyarakat berinteraksi dan menjalankan aktivitas sehari-hari<sup>24</sup>. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa alihfungsi trotoar banyak dipengaruhi oleh tekanan aktivitas ekonomi informal, keterbatasan ruang kota, serta lemahnya pengawasan pemerintah terhadap penggunaan ruang publik<sup>25</sup>. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung membahas trotoar dari sudut pandang tata ruang, mobilitas, dan aktivitas ekonomi informal, sehingga hubungan

---

<sup>22</sup> Matthew Carmona, *Public Places Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design* (Oxford: Architectural Press, 2010), hlm. 153-160.

<sup>23</sup> World Health Organization (WHO), *Solid Waste Management and Health* (Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2016), hlm. 12-15.

<sup>24</sup> Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Cambridge: MIT Press, 1991), hlm. 27-30.

<sup>25</sup> Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, *Pedestrian First: Tools for a Walkable City* (Jakarta: ITDP Indonesia, 2018), hlm. 5-9.

antara perubahan fungsi trotoar dan kerusakan ekologis ruang publik belum banyak dikaji secara mendalam.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih memandang persoalan sampah di ruang publik sebagai persoalan kebersihan dan pelanggaran tata kota semata, tanpa melihat keterkaitannya dengan relasi sosial masyarakat dan tata kelola ruang publik perkotaan. Padahal, praktik pembuangan sampah di trotoar menunjukkan adanya proses sosial yang berlangsung secara berulang hingga membentuk normalisasi penggunaan ruang publik yang menyimpang dari fungsi utamanya. Kondisi ini memperlihatkan adanya celah penelitian (research gap), yaitu belum banyak kajian yang mengintegrasikan perspektif ruang publik dan ekologi sosial dalam melihat fenomena alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah ilegal.

Dengan demikian, penelitian ini memandang alihfungsi trotoar bukan semata sebagai pelanggaran aturan tata kota, tetapi sebagai fenomena sosial-ekologis yang mencerminkan relasi kompleks antara perilaku masyarakat, kelembagaan kota, dan kondisi lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian dengan pendekatan yang lebih holistik, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada pengelolaan ruang publik yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, sehingga trotoar dapat kembali berfungsi sebagai ruang publik yang aman, inklusif, dan mendukung kualitas hidup masyarakat perkotaan.

## 1.2 Permasalahan Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari fenomena alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah yang terjadi di kawasan Jembatan Pelangi, Jakarta Barat. Trotoar yang seharusnya berfungsi sebagai ruang publik bagi pejalan kaki justru mengalami perubahan fungsi menjadi lokasi penumpukan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah aktivitas ekonomi di sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan trotoar tidak lagi dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai jalur pejalan kaki, sekaligus memunculkan berbagai persoalan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kualitas ruang publik perkotaan.

Alihfungsi trotoar menjadi tempat pembuangan sampah tidak hanya menimbulkan gangguan pada aspek fisik ruang, seperti tertutupnya jalur pejalan kaki dan rusaknya infrastruktur trotoar, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis yang signifikan. Tumpukan sampah di atas trotoar berpotensi mencemari tanah dan saluran drainase, menghambat infiltrasi air hujan, memicu bau tidak sedap, serta menjadi sumber berkembangnya vektor penyakit. Dalam konteks ini, trotoar tidak lagi berfungsi sebagai bagian dari sistem ekologis perkotaan, melainkan berubah menjadi sumber degradasi lingkungan yang mengancam kesehatan dan kenyamanan warga.

Lebih jauh, fenomena pembuangan sampah di trotoar menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola ruang publik perkotaan. Trotoar diperlakukan sebagai ruang sisa yang dapat dibebani oleh berbagai aktivitas tanpa pengelolaan yang jelas dan berkelanjutan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta

rendahnya integrasi antara kebijakan pengelolaan ruang publik dan sistem pengelolaan sampah perkotaan. Akibatnya, ruang publik yang seharusnya dijaga sebagai ruang bersama justru mengalami degradasi fungsi dan kualitas lingkungan.

Permasalahan penelitian ini juga berkaitan dengan hilangnya fungsi ekologis trotoar sebagai ruang publik mikro dalam sistem kota. Meskipun sering dianggap sebagai elemen kecil, trotoar memiliki peran ekologis penting sebagai bagian dari jaringan ruang terbuka perkotaan yang mendukung sirkulasi udara, penyerapan air hujan, dan kualitas lingkungan mikro. Ketika trotoar dialihfungsikan menjadi tempat pembuangan sampah, fungsi ekologis tersebut terganggu, sehingga berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan perkotaan secara kumulatif.

Di kawasan Jembatan Pelangi, alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah juga berdampak pada kehidupan sehari-hari warga. Pejalan kaki terpaksa berjalan di badan jalan karena trotoar tertutup sampah, yang meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan menurunkan rasa aman dalam beraktivitas. Selain itu, kondisi lingkungan yang kotor dan tercemar menurunkan kualitas ruang publik sebagai ruang sosial yang seharusnya dapat diakses dan dimanfaatkan secara layak oleh seluruh warga.

Permasalahan penelitian ini terletak pada belum adanya pemahaman yang komprehensif mengenai proses terjadinya alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah serta dampak ekologis yang ditimbulkannya dalam konteks ruang publik perkotaan. Sebagian besar kajian sebelumnya masih menempatkan alihfungsi trotoar dalam kerangka ketertiban, kenyamanan, atau pelanggaran



aturan, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana praktik pembuangan sampah di trotoar berkontribusi terhadap kerusakan ekologis ruang publik.

Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam mengenai faktor-faktor dan dampak ekologis dari alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah di Jembatan Pelangi, Jakarta Barat. Dengan pendekatan kualitatif dan perspektif ekologi sosial serta produksi ruang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana praktik sosial sehari-hari dan tata kelola ruang publik berkontribusi terhadap kerusakan ekologis ruang publik perkotaan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, alihfungsi trotoar menjadi tempat pembuangan sampah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis atau kebersihan, melainkan sebagai fenomena sosial-ekologis yang mencerminkan cara ruang publik diproduksi, dimanfaatkan, dan diabaikan dalam kehidupan perkotaan. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji guna memahami dinamika kerusakan ekologis ruang publik serta implikasinya bagi kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat kota.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah di kawasan Jembatan Pelangi?
2. Bagaimana gambaran kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah di Kawasan Jembatan Pelangi?

3. Bagaimana dampak ekologis yang ditimbulkan oleh alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah terhadap kualitas ruang publik perkotaan di Jembatan Pelangi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah di Jembatan Pelangi.
2. Menganalisis gambaran kerusakan ekologis yang ditimbulkan akibat alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah di kawasan Jembatan Pelangi.
3. Menganalisis dampak ekologis dari alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah terhadap kualitas ruang publik perkotaan di Jembatan Pelangi

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat yang dapat memperkaya pemahaman dalam bidang yang diteliti. Adapun penelitian ini memiliki manfaat penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu sosial, khususnya dalam bidang sosiologi perkotaan, studi ruang publik, serta kajian ekologi sosial. Penelitian ini berupaya memperkaya pemahaman mengenai bagaimana perubahan fungsi ruang publik di

kawasan perkotaan tidak hanya berkaitan dengan persoalan tata ruang secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan dinamika relasi sosial, praktik keseharian masyarakat, serta cara masyarakat memaknai dan menggunakan ruang bersama.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas penerapan Teori Ruang Publik Jürgen Habermas dalam konteks ruang publik perkotaan di Indonesia. Dalam perspektif Habermas, ruang publik dipahami sebagai ruang sosial yang memungkinkan warga untuk berinteraksi, berkomunikasi, serta membentuk opini publik secara bebas dan rasional. Melalui penelitian ini, konsep ruang publik tersebut dianalisis dalam konteks yang lebih konkret, yaitu pada ruang publik fisik seperti trotoar yang seharusnya berfungsi sebagai ruang bersama yang dapat diakses oleh seluruh warga kota.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ekologi Sosial yang dikemukakan oleh Murray Bookchin, yang menekankan bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan pola relasi manusia dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kerusakan ekologis yang terjadi pada trotoar sebagai ruang publik dipahami bukan semata-mata sebagai persoalan teknis pengelolaan sampah, tetapi sebagai konsekuensi dari praktik sosial, lemahnya kesadaran ekologis masyarakat, serta kurang optimalnya pengelolaan ruang publik oleh institusi yang berwenang. Dengan demikian, penelitian ini membantu menjelaskan keterkaitan antara dinamika sosial masyarakat perkotaan dengan munculnya degradasi ekologis pada ruang publik.

Melalui integrasi antara perspektif ruang publik Habermas dan ekologi sosial Bookchin, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memahami alihfungsi ruang publik sebagai fenomena sosial-ekologis yang kompleks, serta memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara ruang publik, masyarakat perkotaan, dan keberlanjutan lingkungan.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait dalam merumuskan strategi pengelolaan ruang publik perkotaan yang lebih sensitif terhadap aspek ekologis. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan penataan trotoar serta integrasi sistem pengelolaan sampah agar tidak lagi membebani ruang publik yang seharusnya berfungsi sebagai jalur pejalan kaki dan ruang ekologis kota.

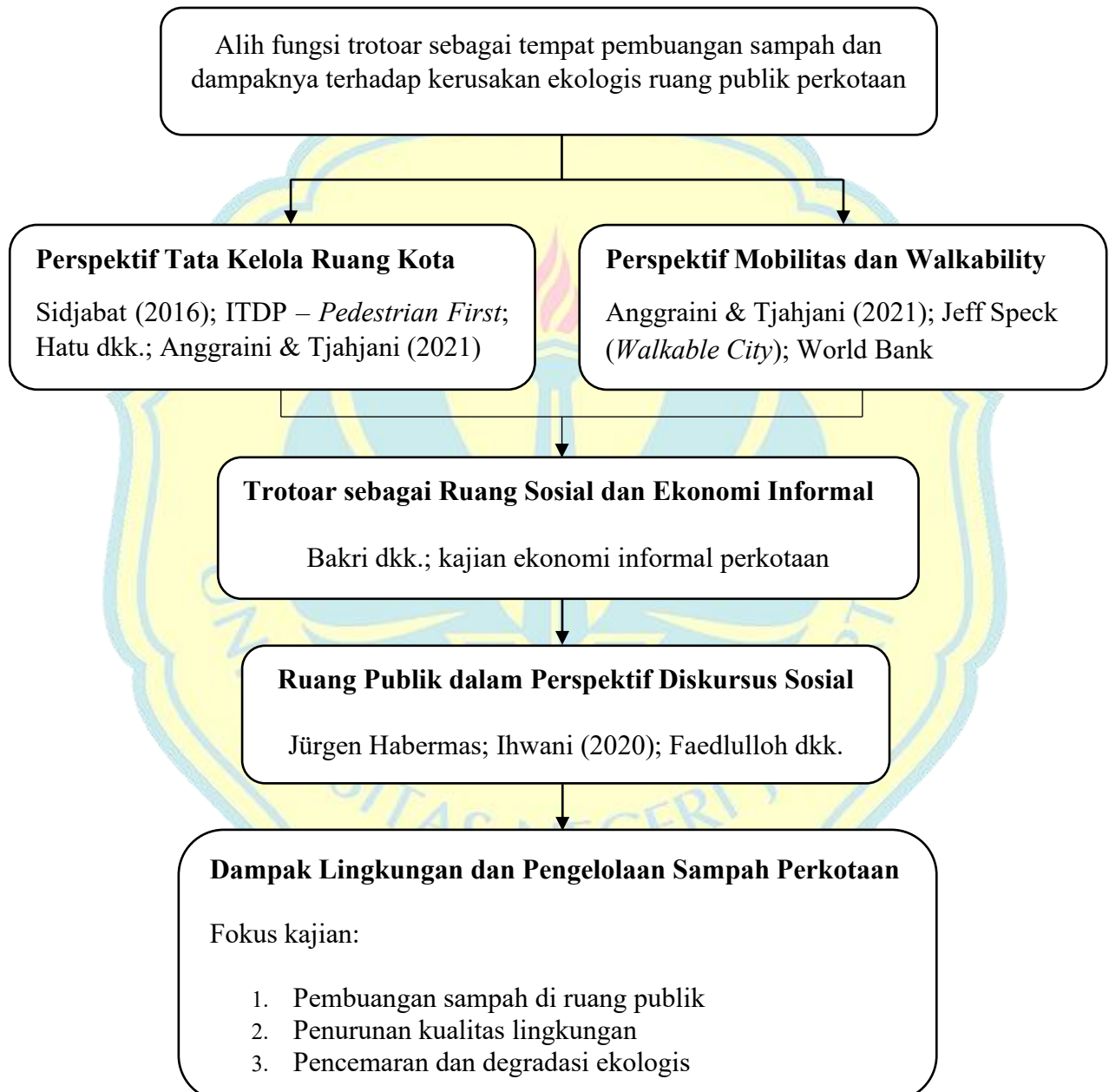
Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga fungsi trotoar sebagai ruang publik yang bersih, aman, dan ramah lingkungan. Dengan memahami dampak ekologis dari praktik pembuangan sampah di trotoar, masyarakat diharapkan lebih terlibat dalam upaya menjaga kualitas lingkungan perkotaan serta mendorong penggunaan ruang publik secara bertanggung jawab.

Selain itu, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi empiris dan konseptual dalam kajian mengenai ruang publik, pengelolaan sampah, dan ekologi perkotaan. Penelitian ini diharapkan membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang mengkaji kerusakan ekologis ruang publik



dengan pendekatan interdisipliner, baik dari perspektif sosiologi, perencanaan kota, maupun studi lingkungan.

### 1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis



Kajian mengenai ruang publik perkotaan telah menjadi perhatian penting dalam berbagai penelitian di bidang sosiologi perkotaan, perencanaan wilayah dan kota, serta studi lingkungan. Ruang publik dipahami sebagai ruang bersama yang dapat diakses oleh seluruh warga kota untuk melakukan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, maupun kultural. Keberadaan ruang publik memiliki peran penting dalam membentuk kualitas kehidupan perkotaan karena menjadi tempat berlangsungnya interaksi sosial, mobilitas masyarakat, serta berbagai praktik kehidupan sehari-hari warga kota. Dalam konteks ini, ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memungkinkan masyarakat membangun relasi sosial dan kehidupan kolektif di lingkungan perkotaan.

Salah satu bentuk ruang publik yang memiliki peran penting dalam kehidupan kota adalah trotoar. Trotoar pada dasarnya dirancang sebagai fasilitas bagi pejalan kaki agar dapat bergerak dengan aman dan nyaman di lingkungan perkotaan. Selain berfungsi sebagai jalur mobilitas, trotoar juga sering dimanfaatkan sebagai ruang interaksi sosial masyarakat karena lokasinya yang berada di sepanjang koridor aktivitas kota. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, trotoar kerap menjadi tempat terjadinya berbagai aktivitas informal seperti berdagang, berinteraksi, maupun kegiatan ekonomi kecil yang dilakukan oleh masyarakat perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa trotoar tidak hanya memiliki fungsi teknis sebagai infrastruktur mobilitas, tetapi juga memiliki dimensi sosial sebagai ruang publik yang hidup dalam kehidupan kota.

Namun demikian, dinamika kehidupan perkotaan yang semakin kompleks sering kali memunculkan berbagai persoalan dalam pemanfaatan ruang publik,

termasuk trotoar. Tekanan aktivitas ekonomi, kepadatan penduduk, serta keterbatasan ruang kota menyebabkan trotoar mengalami berbagai bentuk perubahan fungsi yang tidak selalu sesuai dengan peruntukannya. Dalam banyak kasus, trotoar dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan lain seperti aktivitas perdagangan informal, parkir kendaraan, tempat pembuangan sampah, maupun berbagai aktivitas lain yang berpotensi mengurangi fungsi utamanya sebagai jalur pejalan kaki. Perubahan fungsi tersebut menunjukkan bahwa ruang publik perkotaan merupakan ruang yang terus mengalami proses negosiasi dan kontestasi penggunaan oleh berbagai aktor sosial di kota.

Berbagai penelitian sebelumnya telah berupaya menjelaskan dinamika penggunaan trotoar dari berbagai perspektif. Sebagian penelitian menekankan aspek kebijakan tata ruang dan pengelolaan kota. Pada penelitian Sidjabat, menunjukkan bahwa alihfungsi trotoar di kawasan perkotaan Jakarta dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan pemerintah dan rendahnya konsistensi penegakan aturan tata ruang<sup>26</sup>. Sementara itu, laporan *Pedestrian First: Tools for a Walkable City* yang diterbitkan oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menjelaskan bahwa trotoar di kota-kota berkembang sering mengalami penyalahgunaan fungsi akibat tekanan aktivitas ekonomi informal dan lemahnya perlindungan terhadap ruang pejalan kaki<sup>27</sup>.

<sup>26</sup> R. B. Sidjabat, "Alih Fungsi Trotoar sebagai Dampak Lemahnya Penataan Ruang Perkotaan," *Jurnal Tata Kota dan Daerah* 8, no. 2 (2016): 101-109.

<sup>27</sup> Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, *Pedestrian First: Tools for a Walkable City* (Jakarta: ITDP Indonesia, 2018), hlm. 5-9.

Penelitian lain menyoroti trotoar sebagai bagian dari sistem mobilitas perkotaan dan ruang sosial masyarakat. Penelitian Anggraini dan Tjahjani menemukan bahwa keberadaan pedagang kaki lima, parkir liar, dan hambatan fisik lainnya menyebabkan menurunnya kenyamanan serta aksesibilitas pejalan kaki di trotoar perkotaan<sup>28</sup>. Selain itu, Penelitian Hatu, dkk., mengenai pemanfaatan trotoar sebagai ruang aktivitas ekonomi informal menunjukkan bahwa trotoar sering menjadi arena negosiasi kepentingan antara pejalan kaki, pedagang, dan pengguna kendaraan akibat keterbatasan ruang kota<sup>29</sup>. Kajian-kajian tersebut memberikan pemahaman penting mengenai bagaimana ruang publik digunakan dan dimaknai oleh masyarakat dalam kehidupan perkotaan.

Namun demikian, sebagian besar penelitian masih memandang trotoar terutama sebagai infrastruktur mobilitas atau ruang ekonomi informal, sehingga dimensi ekologis dari perubahan fungsi ruang publik tersebut belum banyak mendapat perhatian. Kajian mengenai dampak ekologis trotoar yang dialihfungsikan sebagai tempat pembuangan sampah, seperti pencemaran lingkungan, gangguan drainase, dan penurunan kualitas ekologis ruang publik, masih relatif terbatas dalam penelitian perkotaan di Indonesia.

Selain itu, kajian mengenai ruang publik juga banyak dipengaruhi oleh perspektif ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas, yang memandang ruang publik sebagai arena interaksi sosial tempat masyarakat dapat bertukar gagasan dan

<sup>28</sup> Putri Dwi Anggraini dan Tjahjani, "Kenyamanan Pejalan Kaki pada Trotoar Perkotaan," *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 21, no. 1 (2021): 45-56.

<sup>29</sup> Rizky R. Hatu dkk., "Pemanfaatan Trotoar sebagai Ruang Aktivitas Ekonomi Informal di Kawasan Perkotaan," *Jurnal Perencanaan Kota* 14, no. 2 (2019): 88-97.



membentuk opini publik. Dalam konteks perkotaan, ruang publik seperti trotoar, taman kota, maupun ruang terbuka lainnya dapat menjadi tempat berlangsungnya interaksi sosial masyarakat. Namun ketika ruang publik tersebut mengalami perubahan fungsi atau penurunan kualitas lingkungan, maka potensi ruang tersebut sebagai ruang interaksi sosial juga dapat mengalami penurunan.

Berangkat dari kondisi tersebut, kajian mengenai alihfungsi trotoar menjadi penting untuk memahami bagaimana perubahan penggunaan ruang publik memengaruhi kehidupan sosial masyarakat sekaligus kualitas lingkungan perkotaan. Kajian mengenai alihfungsi trotoar sebagai bagian dari ruang publik perkotaan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan pendekatan dan fokus yang beragam. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memandang trotoar sebagai infrastruktur mobilitas, ruang sosial, maupun produk kebijakan tata kota. Namun, keterkaitan antara alihfungsi trotoar dan kerusakan ekologis ruang publik masih relatif jarang dikaji secara eksplisit. Oleh karena itu, tinjauan penelitian sejenis berikut ini disusun untuk memetakan posisi penelitian terdahulu, sekaligus menunjukkan celah akademik yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini.

### **1. Alihfungsi Trotoar dalam Perspektif Tata Kelola Ruang Kota**

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa alihfungsi trotoar merupakan salah satu persoalan utama dalam pengelolaan ruang publik perkotaan. Trotoar pada dasarnya dirancang sebagai fasilitas bagi pejalan kaki agar dapat bergerak dengan aman dan nyaman di lingkungan kota. Namun dalam praktiknya, trotoar sering mengalami perubahan fungsi akibat berbagai aktivitas lain seperti perdagangan informal, parkir kendaraan, maupun penggunaan ruang oleh aktivitas ekonomi

lainnya. Penelitian Sidjabat menunjukkan bahwa trotoar di beberapa kawasan perkotaan Jakarta mengalami penyimpangan fungsi karena lemahnya pengawasan pemerintah serta rendahnya konsistensi dalam penegakan kebijakan tata ruang. Trotoar yang seharusnya menjadi fasilitas publik bagi pejalan kaki sering kali dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk kepentingan pribadi atau kegiatan ekonomi<sup>30</sup>. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan alihfungsi trotoar tidak hanya berkaitan dengan perilaku masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya tata kelola ruang kota.

Kajian serupa juga dijelaskan dalam laporan *Pedestrian First: Tools for a Walkable City* yang diterbitkan oleh *Institute for Transportation and Development Policy* (ITDP). Laporan tersebut menjelaskan bahwa kota-kota di negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam melindungi ruang pejalan kaki karena tekanan aktivitas ekonomi informal serta lemahnya pengawasan pemerintah kota. Akibatnya, trotoar yang seharusnya menjadi ruang publik yang aman bagi pejalan kaki sering kali berubah fungsi menjadi ruang aktivitas lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya<sup>31</sup>.

Selain itu, beberapa penelitian tesis di bidang perencanaan wilayah dan kota juga menunjukkan bahwa konflik penggunaan trotoar sering terjadi akibat tumpang tindih kepentingan antara pejalan kaki, pedagang kaki lima, dan kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky. Hatu dkk. mengenai pemanfaatan trotoar sebagai ruang aktivitas ekonomi informal menunjukkan bahwa keberadaan

---

<sup>30</sup> R. B. Sidjabat, *Op. cit.*, hlm. 104.

<sup>31</sup> ITDP Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 7.

pedagang kaki lima di trotoar sering kali menimbulkan konflik ruang dengan pengguna jalan lainnya karena keterbatasan ruang publik di kawasan perkotaan<sup>32</sup>. Di sisi lain, penelitian Anggraini dan Tjahjani mengenai kenyamanan pejalan kaki di trotoar perkotaan menemukan bahwa aktivitas non-peruntukan seperti perdagangan informal dan parkir kendaraan bermotor dapat mengurangi aksesibilitas trotoar bagi pejalan kaki<sup>33</sup>.

Temuan serupa juga dijelaskan dalam berbagai penelitian perencanaan kota yang menunjukkan bahwa trotoar sering menjadi arena kontestasi kepentingan antara berbagai aktor perkotaan<sup>34</sup>. Dalam banyak kasus, keterbatasan ruang kota serta tekanan aktivitas ekonomi menyebabkan trotoar dimanfaatkan secara fleksibel oleh masyarakat, meskipun hal tersebut sering kali bertentangan dengan fungsi awalnya sebagai fasilitas mobilitas pejalan kaki<sup>35</sup>. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa trotoar tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang terus mengalami proses negosiasi penggunaan oleh berbagai kelompok masyarakat dengan kepentingan yang berbeda<sup>36</sup>.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami persoalan alihfungsi trotoar, sebagian besar kajian masih menekankan aspek kebijakan tata ruang dan pengelolaan kota, sehingga belum

---

<sup>32</sup> Rizky R. Hatu dkk., *Op. cit.*, hlm. 92.

<sup>33</sup> Putri Dwi Anggraini dan Tjahjani, *Op. cit.*, hlm. 50.

<sup>34</sup> Henri Lefebvre, *The Production of Space*, diterjemahkan oleh Donald Nicholson-Smith (Oxford: Blackwell, 1991), hlm. 38-40.

<sup>35</sup> Matthew Carmona, *Public Places Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design* (Oxford: Architectural Press, 2010), hlm. 153-160.

<sup>36</sup> Setha M. Low, *On the Plaza: The Politics of Public Space and Culture* (Austin: University of Texas Press, 2000), hlm. 33-36.

banyak membahas dampak ekologis maupun dimensi sosial yang muncul akibat perubahan fungsi ruang tersebut.

## 2. Trotoar dalam Perspektif Mobilitas dan *Walkability*

Kajian trotoar berkaitan dengan kualitas mobilitas pejalan kaki serta konsep *walkability* dalam perencanaan kota. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas trotoar memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Penelitian Anggraini dan Tjahjani menunjukkan bahwa keberadaan hambatan fisik di trotoar seperti pedagang kaki lima, parkir kendaraan, maupun material bangunan dapat menurunkan tingkat kenyamanan pejalan kaki<sup>37</sup>. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan pejalan kaki harus berbagi ruang dengan kendaraan bermotor atau bahkan berjalan di badan jalan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kecelakaan. Kajian mengenai *walkability* juga dijelaskan oleh Speck dalam bukunya *Walkable City*, yang menyatakan bahwa kota yang ramah pejalan kaki membutuhkan trotoar yang aman, bersih, dan bebas dari hambatan. Trotoar yang tertata dengan baik tidak hanya meningkatkan mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong terciptanya kehidupan kota yang lebih aktif dan berkelanjutan<sup>38</sup>.

Selain itu, laporan penelitian dari World Bank mengenai transportasi perkotaan di negara berkembang menunjukkan bahwa kebijakan transportasi di banyak kota masih lebih berorientasi pada kendaraan bermotor dibandingkan pada pejalan kaki. Akibatnya, pembangunan trotoar sering kali tidak menjadi prioritas

<sup>37</sup> Anggraini dan Tjahjani, *Op. cit.*, hlm. 47-48.

<sup>38</sup> Jeff Speck, *Walkable City: How Downtown Can Save America, One Step at a Time* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2012), hlm. 15-22.



utama dalam perencanaan kota<sup>39</sup>. Penelitian lain yang menyoroti aspek *walkability* juga menunjukkan bahwa kualitas lingkungan trotoar seperti kebersihan, keamanan, serta kenyamanan visual memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat untuk berjalan kaki. Lingkungan trotoar yang kotor atau dipenuhi sampah dapat menurunkan kualitas pengalaman berjalan bagi masyarakat<sup>40</sup>. Meskipun kajian mengenai mobilitas ini memberikan pemahaman penting mengenai peran trotoar dalam sistem transportasi perkotaan, sebagian besar penelitian masih menempatkan trotoar sebagai infrastruktur mobilitas, sehingga dimensi sosial dan ekologis ruang publik belum banyak dibahas secara mendalam.

### **3. Trotoar sebagai Ruang Sosial dan Ekonomi Informal**

Trotoar juga sering dimanfaatkan sebagai ruang sosial dan ekonomi oleh masyarakat perkotaan. Penelitian mengenai ekonomi informal menunjukkan bahwa trotoar sering menjadi tempat berkembangnya aktivitas perdagangan informal karena lokasinya yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat<sup>41</sup>. Dalam kajian mengenai ekonomi informal perkotaan dijelaskan bahwa keterbatasan ruang usaha formal di kota mendorong pedagang kecil untuk memanfaatkan ruang publik seperti trotoar sebagai tempat berdagang<sup>42</sup>. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa ruang publik memiliki fleksibilitas dalam menampung berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

---

<sup>39</sup> World Bank, *Urban Transport in Developing Countries* (Washington DC: World Bank Publications, 2013), hlm. 34-39.

<sup>40</sup> Anggraini dan Tjahjani, *Op. cit.*, hlm. 50.

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 52.

<sup>42</sup> Matthew Carmona, *Public Places Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design* (Oxford: Architectural Press, 2010), hlm. 153-160.

Penelitian Bakri dan kolega menunjukkan bahwa penggunaan trotoar sebagai ruang ekonomi informal merupakan hasil dari proses negosiasi sosial antara pedagang, pengguna jalan, dan pemerintah kota<sup>43</sup>. Trotoar tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang terus diproduksi dan dinegosiasikan oleh berbagai aktor perkotaan<sup>44</sup>. Namun demikian, sebagian besar penelitian dalam tema ini masih berfokus pada dimensi aktivitas ekonomi informal dan relasi sosial, sehingga belum banyak membahas bagaimana aktivitas tersebut berdampak pada kondisi ekologis ruang publik<sup>45</sup>.

#### 4. Ruang Publik dan Diskursus Sosial

Kajian mengenai ruang publik juga banyak dipengaruhi oleh konsep ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas. Dalam pemikirannya, ruang publik dipahami sebagai arena sosial tempat warga negara dapat bertemu, berdiskusi, serta membentuk opini publik melalui proses komunikasi yang rasional dan terbuka<sup>46</sup>. Ruang publik memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Salah satu penelitian yang menggunakan perspektif tersebut dilakukan oleh Nur Hadi Ihwani yang meneliti komunitas Maiyah sebagai ruang publik alternatif<sup>47</sup>. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunitas diskusi tersebut memungkinkan masyarakat untuk

<sup>43</sup> Bakri dkk., "Pemanfaatan Trotoar sebagai Ruang Aktivitas Ekonomi Informal di Kawasan Perkotaan," *Jurnal Sosial dan Perkotaan* 12, no. 2 (2020): 88-97.

<sup>44</sup> Henri Lefebvre, *The Production of Space*, diterjemahkan oleh Donald Nicholson-Smith (Oxford: Blackwell, 1991), hlm. 85-101.

<sup>45</sup> Deden Rukmana, "The Politics of Urban Space and Informality in Jakarta," *Cities* Vol. 29 No. 6 (2012): 447-457.

<sup>46</sup> Jürgen Habermas, *Op. cit.*, hlm. 27-30.

<sup>47</sup> Nur Hadi Ihwani, "Komunitas Maiyah sebagai Ruang Publik Alternatif," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 13, no. 1 (2019): 45-60.

bertukar gagasan secara bebas dan egaliter, sehingga mencerminkan konsep ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas.

Penelitian lain dilakukan oleh Dodi Faedlulloh dan kolega yang mengkaji pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa RPTRA merupakan upaya pemerintah dalam menyediakan ruang publik bagi masyarakat kota<sup>48</sup>. Namun dalam praktiknya, pengelolaan ruang tersebut masih dipengaruhi oleh kebijakan negara dan kepentingan institusional sehingga partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas<sup>49</sup>. Selain itu, penelitian mengenai diskursus publik masyarakat dalam pengelolaan sampah di Cirebon menunjukkan bahwa ruang publik dapat berfungsi sebagai media untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap persoalan lingkungan<sup>50</sup>. Melalui diskusi dan interaksi sosial yang berlangsung di ruang publik, masyarakat mulai memandang persoalan lingkungan sebagai isu bersama yang memerlukan partisipasi kolektif.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap berbagai penelitian sejenis, dapat disimpulkan bahwa fenomena alihfungsi trotoar merupakan persoalan yang bersifat struktural dan umum terjadi di kawasan perkotaan. Trotoar sebagai bagian dari ruang publik tidak lagi berfungsi secara optimal sebagai jalur pejalan kaki, melainkan mengalami pergeseran fungsi akibat tekanan aktivitas sosial, ekonomi,

---

<sup>48</sup> Dodi Faedlulloh dkk., "Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Partisipasi Masyarakat di Jakarta," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 2 (2018): 120-134.

<sup>49</sup> Dodi Faedlulloh dkk., *Op. cit.*, hlm. 128.

<sup>50</sup> Ahmad Syaifudin, "Diskursus Publik dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Cirebon," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 22, no. 1 (2020): 75-88.

dan lemahnya pengelolaan ruang kota<sup>51</sup>. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa perubahan fungsi tersebut berdampak pada penurunan kualitas ruang publik, terutama dalam hal kenyamanan, keselamatan, dan aksesibilitas bagi pejalan kaki.

Penelitian-penelitian terdahulu juga memperlihatkan bahwa alihfungsi trotoar dipahami terutama dari sudut pandang sosial, fungsional, dan teknis. Trotoar banyak dikaji sebagai arena konflik kepentingan, ruang ekonomi informal, atau objek evaluasi standar pelayanan kota<sup>52</sup>. Meskipun pendekatan-pendekatan tersebut memberikan gambaran penting mengenai dinamika penggunaan trotoar, kajian yang ada masih cenderung memposisikan trotoar sebatas sebagai infrastruktur mobilitas atau ruang sosial, sehingga belum sepenuhnya menempatkan trotoar sebagai bagian dari sistem ekologis perkotaan. Di sisi lain, kajian mengenai sampah dan lingkungan perkotaan menunjukkan bahwa praktik pembuangan sampah di ruang publik berkontribusi terhadap kerusakan ekologis, seperti pencemaran tanah, gangguan drainase, dan penurunan kualitas lingkungan<sup>53</sup>. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya tidak secara spesifik mengaitkan persoalan sampah dengan alihfungsi trotoar sebagai ruang publik, sehingga hubungan antara perubahan fungsi trotoar dan dampak ekologisnya belum menjelaskan secara komprehensif<sup>54</sup>.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat celah penelitian yang signifikan, yaitu kurangnya kajian yang mengintegrasikan analisis alihfungsi

---

<sup>51</sup> R. B. Sidjabat, *Op. cit.*, hlm. 104.

<sup>52</sup> Anggraini dan Tjahjani, *Op. cit.*, hlm. 50-56.

<sup>53</sup> Bakri dkk., *Op. cit.*, hlm. 92.

<sup>54</sup> Murray Bookchin, *The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy* (Palo Alto: Cheshire Books, 1982), hlm. 4-12.



trotoar khususnya sebagai tempat pembuangan sampah dengan kerusakan ekologis ruang publik perkotaan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan memfokuskan perhatian pada bagaimana praktik pembuangan sampah di trotoar tidak hanya menghilangkan fungsi sosial dan fungsional ruang publik, tetapi juga memicu degradasi ekologis yang berdampak pada kualitas lingkungan dan keberlanjutan ruang kota<sup>55</sup>.

### 1.6 Kerangka Konseptual

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa ruang publik perkotaan merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial masyarakat kota. Ruang publik tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik yang dapat diakses oleh masyarakat, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi, komunikasi, dan pertukaran kepentingan antarwarga. Dalam perspektif Habermas, ruang publik merupakan arena sosial di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam kehidupan kolektif melalui proses komunikasi yang terbuka dan rasional. Melalui ruang publik, warga dapat membangun relasi sosial, membentuk opini publik, serta mengekspresikan kepentingan bersama dalam kehidupan masyarakat<sup>56</sup>. Oleh karena itu, keberadaan ruang publik yang terbuka, inklusif, dan dapat diakses secara setara menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas kehidupan sosial di lingkungan perkotaan.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 10-12.

<sup>56</sup> Jürgen Habermas, *Op. cit.*, hlm. 50-67.

Dalam konteks kota modern yang ditandai oleh kepadatan penduduk, tingginya aktivitas ekonomi, serta keterbatasan ruang terbuka, ruang publik sering kali mengalami tekanan pemanfaatan yang cukup besar. Kondisi tersebut menyebabkan ruang publik tidak selalu digunakan sesuai dengan fungsi awalnya, melainkan sering mengalami perubahan atau pergeseran fungsi akibat berbagai praktik sosial masyarakat. Ruang publik seperti taman kota, halte transportasi, maupun trotoar sering dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang berbeda, baik untuk aktivitas ekonomi informal, aktivitas sosial, maupun kegiatan lain yang tidak selalu sejalan dengan fungsi perencanaan awal ruang tersebut<sup>57</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa ruang publik di perkotaan merupakan ruang yang dinamis, yang terus mengalami proses pemanfaatan, negosiasi, serta perubahan fungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota.

Trotoar sebagai salah satu bentuk ruang publik perkotaan memiliki fungsi utama sebagai jalur bagi pejalan kaki yang bertujuan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, serta aksesibilitas mobilitas non-kendaraan. Selain berfungsi sebagai infrastruktur mobilitas, trotoar juga memiliki dimensi sosial karena menjadi ruang interaksi informal bagi masyarakat dalam aktivitas keseharian di lingkungan perkotaan. Dalam praktiknya, trotoar juga memiliki peran ekologis sebagai bagian dari sistem lingkungan mikro kota, seperti membantu pengaturan aliran air permukaan, mendukung kualitas lingkungan sekitar, serta berkontribusi terhadap keteraturan tata ruang perkotaan. Namun demikian, berbagai tekanan aktivitas perkotaan sering menyebabkan trotoar mengalami perubahan fungsi yang dapat

---

<sup>57</sup> Luke Goode, *Jürgen Habermas: Democracy and the Public Sphere* (London: Pluto Press, 2005).

mengganggu peran sosial maupun ekologisnya sebagai bagian dari ruang publik kota<sup>58</sup>.

Salah satu bentuk perubahan fungsi tersebut adalah penggunaan trotoar sebagai tempat pembuangan sampah. Fenomena ini menunjukkan adanya penyimpangan pemanfaatan ruang publik yang tidak hanya berdampak pada terganggunya mobilitas pejalan kaki, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan lingkungan di kawasan perkotaan.<sup>59</sup> Tumpukan sampah yang berada di trotoar dapat menyebabkan pencemaran lingkungan mikro, menurunkan kualitas visual ruang kota, serta mengganggu sistem drainase yang berpotensi memicu genangan air di kawasan sekitar<sup>60</sup>. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan fungsi trotoar tidak hanya berdampak pada aspek sosial ruang publik, tetapi juga berkaitan dengan kerusakan ekologis yang terjadi dalam lingkungan perkotaan.

Penelitian ini menggunakan perspektif Ekologi Sosial yang dikembangkan oleh Bookchin guna menjelaskan fenomena tersebut secara lebih komprehensif. Dalam teori ekologi sosial dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis atau perilaku individu semata, melainkan berkaitan erat dengan struktur sosial, pola relasi kekuasaan, serta cara masyarakat memanfaatkan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari<sup>61</sup>. Dengan kata lain, krisis ekologis merupakan refleksi dari krisis sosial yang muncul dari relasi manusia dengan ruang hidupnya. Melalui pendekatan ini, alihfungsi trotoar sebagai tempat

<sup>58</sup> Stephen Carr dkk., *Public Space* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).

<sup>59</sup> R.B. Sidjabat, *Op. cit.*, hlm. 104.

<sup>60</sup> World Health Organization (WHO), *Op. cit.*, hlm. 13.

<sup>61</sup> Murray Bookchin, *Op. cit.*, hlm. 8.

pembuangan sampah dipahami sebagai bagian dari praktik sosial yang mencerminkan lemahnya kesadaran ekologis serta kurangnya tata kelola ruang publik yang berkelanjutan dalam lingkungan perkotaan.

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana trotoar sebagai ruang publik mengalami perubahan fungsi menjadi tempat pembuangan sampah, faktor-faktor sosial yang mendorong terjadinya perubahan tersebut, serta dampak ekologis yang ditimbulkan terhadap kualitas ruang publik perkotaan. Dengan mengintegrasikan perspektif ruang publik dari Habermas dan teori ekologi sosial dari Bookchin, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara praktik sosial masyarakat, pemanfaatan ruang publik, serta konsekuensi ekologis yang muncul dalam kehidupan kota.

#### **1.6.1 Ruang Publik Perkotaan**

Konsep ruang publik merupakan salah satu gagasan penting dalam kajian ilmu sosial, khususnya dalam memahami hubungan antara masyarakat, negara, dan ruang sosial tempat interaksi warga berlangsung. Salah satu pemikir yang memberikan kontribusi besar terhadap konsep ini adalah Habermas melalui karyanya *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Habermas menjelaskan bahwa ruang publik merupakan arena sosial di mana individu-individu sebagai warga negara dapat berkumpul untuk mendiskusikan persoalan bersama secara terbuka, rasional, dan bebas dari dominasi kekuasaan. Dalam ruang publik tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat,



membentuk opini publik, serta terlibat dalam proses komunikasi yang bersifat deliberatif<sup>62</sup>.

Habermas menelusuri perkembangan historis ruang publik sejak munculnya masyarakat borjuis di Eropa pada abad ke-18, di mana ruang publik berkembang melalui berbagai institusi sosial seperti kafe, salon sastra, surat kabar, dan forum diskusi yang memungkinkan warga berdialog mengenai persoalan sosial dan politik. Ruang publik pada masa tersebut menjadi medium penting bagi terbentuknya opini publik yang kemudian berperan dalam mengawasi kekuasaan negara<sup>63</sup>. Dengan demikian, ruang publik tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memungkinkan terjadinya komunikasi rasional di antara warga masyarakat.

Dalam perkembangan masyarakat modern, konsep ruang publik tidak lagi terbatas pada ruang diskusi politik formal, tetapi juga mencakup berbagai ruang sosial yang memungkinkan interaksi antarwarga secara terbuka. Ruang publik dapat berbentuk ruang fisik di lingkungan perkotaan seperti taman kota, alun-alun, trotoar, maupun fasilitas transportasi publik yang dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Keberadaan ruang-ruang tersebut memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi, bertukar informasi, serta menjalankan aktivitas sosial sehari-hari yang menjadi bagian dari kehidupan kolektif warga kota<sup>64</sup>. Dengan kata lain,

---

<sup>62</sup> Jürgen Habermas. *Op. cit.*, hlm 56.

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm 73-82

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm 30-32

ruang publik memiliki fungsi sosial yang penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang inklusif dan partisipatif.

Habermas menekankan bahwa kualitas ruang publik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana ruang tersebut dapat diakses secara setara oleh seluruh warga masyarakat. Ruang publik yang ideal harus bersifat terbuka, inklusif, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Ketika ruang publik mengalami pembatasan akses, komersialisasi berlebihan, atau penyalahgunaan fungsi, maka ruang tersebut berpotensi kehilangan perannya sebagai arena komunikasi publik yang sehat. Dalam konteks perkotaan, kondisi tersebut dapat terjadi ketika ruang publik digunakan untuk kepentingan tertentu yang mengabaikan kepentingan bersama masyarakat luas<sup>65</sup>.

Trotoar dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ruang publik perkotaan yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat. Trotoar tidak hanya berfungsi sebagai jalur mobilitas bagi pejalan kaki, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi informal antarwarga<sup>66</sup>. Namun ketika trotoar mengalami perubahan fungsi, misalnya menjadi tempat pembuangan sampah, maka fungsi ruang publik tersebut mengalami degradasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan ruang publik di perkotaan tidak hanya bergantung pada keberadaan fisiknya, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dan pemerintah mengelola serta memanfaatkan ruang tersebut secara bertanggung jawab.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 101.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 112-115.

Dengan menggunakan perspektif ruang publik dari Habermas, penelitian ini memandang bahwa alihfungsi trotoar tidak sekadar persoalan teknis pengelolaan ruang kota, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat memaknai dan menggunakan ruang publik dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ruang publik tidak lagi diperlakukan sebagai ruang bersama yang harus dijaga keberfungsian, maka ruang tersebut menjadi rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan perkotaan.

### **1.6.2 Trotoar sebagai Ruang Publik**

Trotoar merupakan salah satu elemen penting dalam struktur ruang publik perkotaan yang berfungsi untuk mendukung mobilitas masyarakat, khususnya bagi pejalan kaki. Dalam sistem tata kota modern, trotoar dirancang sebagai infrastruktur yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi pengguna jalan yang berjalan kaki<sup>67</sup>. Keberadaan trotoar menjadi indikator penting dari kualitas tata kelola ruang kota, karena menunjukkan sejauh mana sebuah kota memberikan perhatian terhadap mobilitas non-kendaraan serta hak warga untuk bergerak secara aman di ruang publik. Dengan demikian, trotoar tidak hanya berfungsi sebagai jalur sirkulasi, tetapi juga sebagai bagian dari ruang publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Trotoar juga memiliki dimensi sosial yang penting dalam kehidupan perkotaan. Dalam praktik keseharian, trotoar sering menjadi ruang interaksi

---

<sup>67</sup> United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), *Global Public Space Toolkit* (Nairobi: UN-Habitat, 2015).

informal bagi masyarakat kota. Warga dapat saling berpapasan, berkomunikasi secara singkat, atau bahkan melakukan aktivitas sosial sederhana di sepanjang jalur pejalan kaki tersebut. Interaksi sosial yang terjadi di ruang-ruang seperti trotoar mencerminkan karakter kehidupan kota yang dinamis dan terbuka. Dalam perspektif ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas, ruang publik tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan interaksi antarwarga<sup>68</sup>. Oleh karena itu, trotoar dapat dipandang sebagai salah satu bentuk ruang publik mikro yang berperan dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat perkotaan.

Trotoar memiliki peran ekologis dalam sistem lingkungan perkotaan. Secara ekologis, trotoar berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan mikro kota, terutama melalui pengaturan aliran air hujan, pengurangan limpasan permukaan, serta mendukung keteraturan tata ruang yang dapat meminimalkan dampak negatif aktivitas perkotaan terhadap lingkungan<sup>69</sup>. Dalam beberapa desain perkotaan modern, trotoar bahkan dirancang dengan pendekatan ramah lingkungan melalui penggunaan material permeabel yang memungkinkan air meresap ke dalam tanah serta integrasi dengan vegetasi kota seperti pohon peneduh dan jalur hijau. Dengan demikian, trotoar tidak hanya menjadi fasilitas mobilitas, tetapi juga bagian dari infrastruktur ekologis yang mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan.

---

<sup>68</sup> Jürgen Habermas. *Op. cit.*, hlm 56-67.

<sup>69</sup> Stephen Carr dkk., *Op. cit.*, hlm. 34-35.



Dalam praktiknya trotoar di banyak kota sering mengalami perubahan fungsi akibat tekanan aktivitas perkotaan yang semakin kompleks. Tingginya kepadatan penduduk, keterbatasan ruang terbuka, serta meningkatnya aktivitas ekonomi informal sering menyebabkan trotoar dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan di luar fungsi utamanya. Trotoar dapat berubah menjadi tempat berdagang, area parkir kendaraan, hingga lokasi pembuangan sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa trotoar sebagai ruang publik tidak selalu digunakan sesuai dengan peruntukan awalnya, melainkan menjadi ruang yang terus mengalami negosiasi antara berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kehidupan perkotaan<sup>70</sup>.

Perubahan fungsi trotoar tersebut tidak hanya berdampak pada terganggunya mobilitas pejalan kaki, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas ruang publik secara keseluruhan. Ketika trotoar tidak lagi dapat digunakan secara optimal oleh pejalan kaki, maka fungsi sosial dan ekologis ruang tersebut juga ikut mengalami penurunan<sup>71</sup>. Oleh karena itu, memahami trotoar sebagai bagian dari ruang publik menjadi penting untuk melihat bagaimana praktik pemanfaatan ruang oleh masyarakat dapat memengaruhi kualitas lingkungan dan kehidupan sosial di kawasan perkotaan.

---

<sup>70</sup> Jürgen Habermas. *Op. cit.*, hlm 70.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 78.

### 1.6.3 Praktik Sosial dalam Pemanfaatan Ruang Publik

Dalam kehidupan perkotaan, ruang publik tidak selalu dimanfaatkan sesuai dengan fungsi formal yang telah direncanakan dalam kebijakan tata kota. Meskipun ruang publik seperti trotoar, taman kota, dan jalur pedestrian dirancang untuk mendukung mobilitas, rekreasi, dan interaksi sosial warga, dalam praktiknya pemanfaatan ruang tersebut sering kali mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena ruang publik pada dasarnya merupakan ruang yang terbuka dan dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat dengan kepentingan yang beragam<sup>72</sup>. Kondisi tersebut membuat ruang publik menjadi arena sosial yang dinamis, di mana berbagai aktivitas masyarakat berlangsung secara bersamaan dan sering kali melampaui fungsi awal ruang tersebut.

Berbagai aktor sosial di perkotaan seperti warga sekitar, pedagang kaki lima, pengguna kendaraan, maupun kelompok masyarakat lainnya sering memanfaatkan ruang publik secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Dalam banyak kasus, keterbatasan ruang ekonomi formal dan tingginya aktivitas perkotaan mendorong masyarakat untuk menggunakan ruang publik sebagai alternatif ruang aktivitas<sup>73</sup>. Trotoar misalnya, selain digunakan sebagai jalur pejalan kaki, sering dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima untuk berdagang, oleh pengendara sebagai tempat parkir kendaraan, atau oleh masyarakat sebagai ruang aktivitas informal lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang publik tidak

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 124-126

<sup>73</sup> Matthew Carmona, *Public Places, Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design* (Oxford: Architectural Press, 2010).

hanya berfungsi sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang terus diproduksi dan dimaknai melalui praktik keseharian masyarakat kota.

Beberapa bentuk praktik sosial yang umum terjadi dalam pemanfaatan ruang publik antara lain penggunaan trotoar sebagai lokasi berdagang oleh pedagang kaki lima, pemanfaatan trotoar atau bahu jalan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor, serta pembuangan sampah di ruang publik seperti trotoar, taman kota, maupun bantaran sungai. Selain itu, ruang publik juga sering dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas informal lain seperti tempat berkumpul komunitas, area bermain anak secara spontan, hingga lokasi kegiatan ekonomi skala kecil. Praktik-praktik tersebut memperlihatkan bahwa ruang publik sering menjadi ruang adaptif yang digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi yang tidak selalu terakomodasi oleh perencanaan kota formal<sup>74</sup>.

Fenomena pemanfaatan ruang publik secara fleksibel ini menunjukkan bahwa ruang publik merupakan ruang yang terus mengalami proses negosiasi antara berbagai kepentingan masyarakat perkotaan. Kepentingan mobilitas pejalan kaki, aktivitas ekonomi informal, kebutuhan parkir kendaraan, hingga praktik pembuangan sampah sering kali bertemu dan saling berkompetisi dalam ruang yang sama. Dalam perspektif teori ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas, ruang publik seharusnya menjadi ruang yang memungkinkan interaksi dan partisipasi warga secara setara dalam kehidupan sosial. Namun dalam realitas perkotaan yang kompleks, ruang publik sering kali mengalami distorsi fungsi akibat

---

<sup>74</sup> Jan Gehl, *Cities for People* (Washington DC: Island Press, 2010).

tekanan ekonomi, keterbatasan ruang kota, serta lemahnya pengelolaan dan pengawasan terhadap penggunaan ruang tersebut<sup>75</sup>.

Praktik sosial dalam pemanfaatan ruang publik dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika kehidupan kota yang memperlihatkan bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap keterbatasan ruang yang tersedia. Namun di sisi lain, praktik-praktik tersebut juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap kualitas ruang publik, seperti terganggunya fungsi mobilitas, menurunnya kenyamanan lingkungan, serta munculnya dampak ekologis akibat penggunaan ruang yang tidak berkelanjutan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini, khususnya terkait fenomena alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah yang berpotensi menurunkan kualitas ruang publik perkotaan.

#### **1.6.4 Perubahan Fungsi Ruang Publik: Alihfungsi Trotoar**

Dimensi perubahan fungsi ruang publik merupakan inti dari permasalahan penelitian ini, karena pada titik inilah berbagai faktor struktural dan praktik sosial berkelindan dan termanifestasi secara konkret dalam bentuk alihfungsi trotoar. Trotoar yang secara normatif dirancang sebagai jalur pejalan kaki mengalami pergeseran fungsi menjadi tempat pembuangan sampah, baik secara sementara maupun permanen. Perubahan ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses gradual yang dibentuk oleh interaksi antara kebijakan tata ruang yang tidak

---

<sup>75</sup> Jürgen Habermas. *Op. cit.*, hlm 176.



efektif, lemahnya pengawasan, serta praktik sosial masyarakat yang berlangsung secara berulang dalam kehidupan sehari-hari<sup>76</sup>.

Trotoar mengalami pergeseran makna dari ruang publik yang memiliki fungsi mobilitas dan sosial menjadi ruang sisa yang menampung residu aktivitas perkotaan. Konsep “ruang sisa” ini merujuk pada ruang yang secara fisik ada, tetapi secara sosial kehilangan fungsi dan nilai normatifnya. Ketika trotoar tidak lagi diperlakukan sebagai ruang yang harus dijaga keberfungsianannya, maka ruang tersebut menjadi rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan, termasuk pembuangan sampah<sup>77</sup>. Pemaknaan ruang yang menyimpang ini memperlihatkan bagaimana ruang publik dapat kehilangan sifat inklusif dan egaliternya akibat praktik pemanfaatan yang tidak terkendali.

Alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah berdampak langsung pada hilangnya aksesibilitas bagi pejalan kaki. Jalur yang seharusnya menjamin pergerakan aman dan nyaman menjadi terhalang oleh tumpukan sampah, sehingga memaksa pejalan kaki untuk menggunakan badan jalan. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas<sup>78</sup>. Dengan demikian, perubahan fungsi trotoar tidak hanya menciptakan persoalan ruang, tetapi juga berdampak pada keselamatan dan hak warga atas ruang publik yang layak.

---

<sup>76</sup> Henri Lefebvre, *The Production of Space*, diterjemahkan oleh Donald Nicholson-Smith (Oxford: Blackwell, 1991), hlm. 85-101.

<sup>77</sup> Marc Augé, *Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity* (London: Verso, 1995), hlm. 77-94.

<sup>78</sup> World Health Organization (WHO), *Global Age-friendly Cities: A Guide* (Geneva: WHO Press, 2007), hlm. 18-26.

Alihfungsi trotoar juga berimplikasi pada penurunan kualitas visual dan kenyamanan ruang publik. Keberadaan sampah di trotoar menciptakan kesan kumuh, mengurangi estetika lingkungan perkotaan, serta menurunkan kualitas pengalaman ruang bagi pengguna kota. Ruang publik yang semestinya berperan sebagai ruang interaksi sosial dan mobilitas justru berubah menjadi simbol degradasi tata kelola kota. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat siklus pengabaian, di mana ruang yang telah rusak semakin ditinggalkan dan kehilangan nilai sosialnya<sup>79</sup>.

Perubahan fungsi trotoar menjadi tempat pembuangan sampah membuka pintu bagi kerusakan ekologis ruang publik. Trotoar tidak dirancang untuk menampung limbah dalam jumlah besar, sehingga keberadaan sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan mikro, menyumbat saluran drainase, serta mempercepat degradasi material fisik trotoar. Dampak ekologis ini tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan sistem lingkungan perkotaan yang lebih luas, seperti peningkatan genangan air dan penurunan kualitas sanitasi lingkungan<sup>80</sup>.

Dalam kerangka konseptual penelitian ini, dimensi perubahan fungsi ruang publik dipahami sebagai penghubung antara praktik sosial dan dampak ekologis. Alihfungsi trotoar merupakan titik transisi di mana kebiasaan sosial dan kelemahan struktural bertransformasi menjadi persoalan ekologis yang nyata. Dengan demikian, perubahan fungsi ruang tidak hanya mencerminkan pergeseran

---

<sup>79</sup> Jane Jacobs, *The Death and Life of Great American Cities* (New York: Random House, 1961), hlm. 29-40.

<sup>80</sup> UN-Habitat, *Streets as Public Spaces and Drivers of Urban Prosperity* (Nairobi: United Nations Human Settlements Programme, 2013), hlm. 66-72.

penggunaan fisik trotoar, tetapi juga mencerminkan relasi sosial yang timpang dalam pengelolaan ruang publik serta kegagalan kota dalam menjaga keberlanjutan ekologisnya.

#### **1.6.5 Teori Ekologi Sosial – Murray Bookchin**

Teori Ekologi Sosial yang dikembangkan oleh Murray Bookchin berangkat dari kritik terhadap cara pandang ekologis konvensional yang memisahkan krisis lingkungan dari struktur sosial manusia. Bookchin menegaskan bahwa permasalahan ekologis tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari faktor alamiah atau kesalahan teknis dalam pengelolaan lingkungan, melainkan berakar pada relasi sosial yang bersifat hierarkis, dominatif, dan eksploitatif<sup>81</sup>. Dengan demikian, krisis ekologis dipandang sebagai refleksi dari krisis sosial, di mana pola dominasi manusia terhadap sesamanya direproduksi dalam relasi manusia dengan alam dan ruang hidupnya.

Dalam kerangka ekologi sosial, lingkungan bukanlah entitas pasif yang berdiri di luar masyarakat, melainkan bagian integral dari sistem sosial. Cara manusia memperlakukan lingkungan sangat ditentukan oleh struktur sosial, nilai budaya, dan sistem ekonomi yang melingkupinya. Ketika relasi sosial dibangun di atas logika penguasaan dan eksploitasi, maka lingkungan termasuk ruang publik perkotaan akan diperlakukan sebagai objek yang dapat dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologisnya<sup>82</sup>. Perspektif ini menjadi penting

---

<sup>81</sup> Murray Bookchin. *Op. cit.*, hlm. 4-7.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 19-23.

untuk memahami mengapa praktik pembuangan sampah di trotoar dapat berlangsung secara terus-menerus meskipun menimbulkan kerusakan lingkungan.





Dalam konteks penelitian ini, alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah mencerminkan relasi sosial yang menempatkan ruang publik sebagai ruang subordinat yang tidak memiliki nilai ekologis maupun sosial yang setara dengan ruang privat atau ruang ekonomi. Trotoar diperlakukan sebagai ruang yang dapat dieksploitasi untuk menampung residu aktivitas manusia, tanpa adanya kesadaran kolektif akan tanggung jawab ekologis terhadap ruang tersebut. Praktik ini sejalan dengan kritik Bookchin terhadap masyarakat modern yang memisahkan manusia dari lingkungannya dan mengaburkan hubungan etis antara keduanya<sup>83</sup>.

Bookchin juga menekankan bahwa dominasi terhadap alam tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan kelanjutan dari struktur dominasi dalam masyarakat. Hierarki sosial, ketimpangan kekuasaan, serta marginalisasi kelompok tertentu menciptakan kondisi di mana ruang publik tidak dikelola secara partisipatif dan berkelanjutan. Dalam kasus alihfungsi trotoar, lemahnya posisi ruang publik dalam prioritas kebijakan perkotaan mencerminkan relasi kuasa yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan efisiensi jangka pendek dibandingkan keberlanjutan ekologis dan kualitas hidup warga kota<sup>84</sup>.

Teori ekologi sosial membantu menjelaskan bahwa kerusakan ekologis trotoar bukan sekadar akibat teknis dari keberadaan sampah secara fisik, seperti bau tidak sedap, pencemaran, atau gangguan drainase. Kerusakan tersebut merupakan manifestasi dari kegagalan sosial dalam membangun relasi yang berkelanjutan

---

<sup>83</sup> Murray Bookchin. *Op. cit.*, hlm. 65-68.

<sup>84</sup> Bookchin, *The Ecology of Freedom*, hlm. 27-31.

antara manusia, ruang publik, dan lingkungan perkotaan. Ketika ruang publik tidak diperlakukan sebagai bagian dari ekosistem kota yang harus dijaga bersama, maka degradasi ekologis menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan.

Dalam perspektif Bookchin, pemulihan ekologi tidak dapat dicapai hanya melalui solusi teknis atau kebijakan parsial, tetapi memerlukan perubahan mendasar dalam cara masyarakat memandang dan mengelola ruang hidupnya. Oleh karena itu, memahami alihfungsi trotoar melalui teori ekologi sosial memungkinkan penelitian ini untuk melihat kerusakan ekologis sebagai persoalan struktural dan sosial, bukan semata-mata sebagai pelanggaran fungsi ruang. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa perbaikan kualitas ruang publik perkotaan harus disertai dengan transformasi relasi sosial dan tata kelola yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

#### **1.6.6 Hubungan Antar Konsep**

Dalam penelitian ini, hubungan antar konsep disusun untuk menjelaskan keterkaitan antara ruang publik, praktik sosial dalam pemanfaatan ruang, alihfungsi trotoar, serta kerusakan ekologis ruang publik perkotaan. Trotoar dipahami sebagai bagian dari ruang publik yang secara normatif dirancang untuk menunjang mobilitas pejalan kaki serta mendukung kualitas lingkungan perkotaan<sup>85</sup>. Sebagai ruang publik, trotoar seharusnya dapat diakses secara bebas oleh masyarakat dan berfungsi sebagai ruang bersama yang memungkinkan berlangsungnya aktivitas sosial secara aman, nyaman, dan setara. Namun dalam praktiknya, ruang publik

---

<sup>85</sup> Stephen Carr dkk., *Op. cit.*, hlm. 1-3.

perkotaan tidak selalu digunakan sesuai dengan fungsi yang telah direncanakan, melainkan mengalami berbagai bentuk perubahan pemanfaatan akibat dinamika sosial masyarakat kota.

Dalam perspektif teori ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas, ruang publik merupakan arena sosial yang memungkinkan warga berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara terbuka. Ruang publik idealnya menjadi ruang yang inklusif dan dapat digunakan bersama oleh masyarakat tanpa dominasi kepentingan tertentu<sup>86</sup>. Trotoar sebagai bagian dari ruang publik perkotaan pada dasarnya memiliki fungsi untuk mendukung mobilitas pejalan kaki sekaligus menjadi ruang interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Oleh karena itu, keberadaan trotoar memiliki peran penting dalam menciptakan ruang kota yang demokratis, inklusif, dan mendukung kualitas kehidupan perkotaan<sup>87</sup>.

Dalam realitas perkotaan yang kompleks, pemanfaatan ruang publik sering kali dipengaruhi oleh berbagai praktik sosial masyarakat yang berkembang secara informal. Praktik sosial tersebut mencerminkan cara masyarakat memanfaatkan ruang publik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari<sup>88</sup>. Dalam konteks ini, trotoar tidak hanya digunakan sebagai jalur pejalan kaki, tetapi juga dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas lain seperti berdagang, parkir kendaraan, maupun pembuangan sampah. Berbagai praktik sosial tersebut menunjukkan

---

<sup>86</sup> Jürgen Habermas, *Op. cit.*, hlm. 27-30.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 54.

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm 78-80.

bahwa ruang publik merupakan ruang yang dinamis dan terus mengalami proses negosiasi antara berbagai kepentingan masyarakat perkotaan.

Praktik sosial dalam pemanfaatan ruang publik tersebut kemudian dapat mendorong terjadinya alihfungsi trotoar dari fungsi utamanya sebagai jalur pejalan kaki menjadi ruang yang menampung aktivitas lain yang tidak sesuai dengan peruntukan awalnya<sup>89</sup>. Salah satu bentuk alihfungsi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penggunaan trotoar sebagai tempat pembuangan sampah. Alihfungsi ini menunjukkan adanya pergeseran pemanfaatan ruang publik yang tidak hanya mengganggu fungsi mobilitas trotoar, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas ruang publik secara keseluruhan.

Alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah selanjutnya berdampak pada munculnya berbagai bentuk kerusakan ekologis dalam lingkungan perkotaan. Keberadaan sampah di trotoar dapat mengganggu kebersihan lingkungan, menurunkan kualitas ruang publik, serta menghambat fungsi ekologis ruang kota seperti pengelolaan air hujan dan kualitas lingkungan mikro. Dalam perspektif teori ekologi sosial yang dikemukakan oleh Bookchin, kerusakan ekologis tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis lingkungan, melainkan berkaitan erat dengan relasi sosial dan cara masyarakat mengelola ruang hidupnya. Kerusakan lingkungan perkotaan merupakan refleksi dari praktik sosial dan struktur pengelolaan ruang yang tidak berkelanjutan<sup>90</sup>.

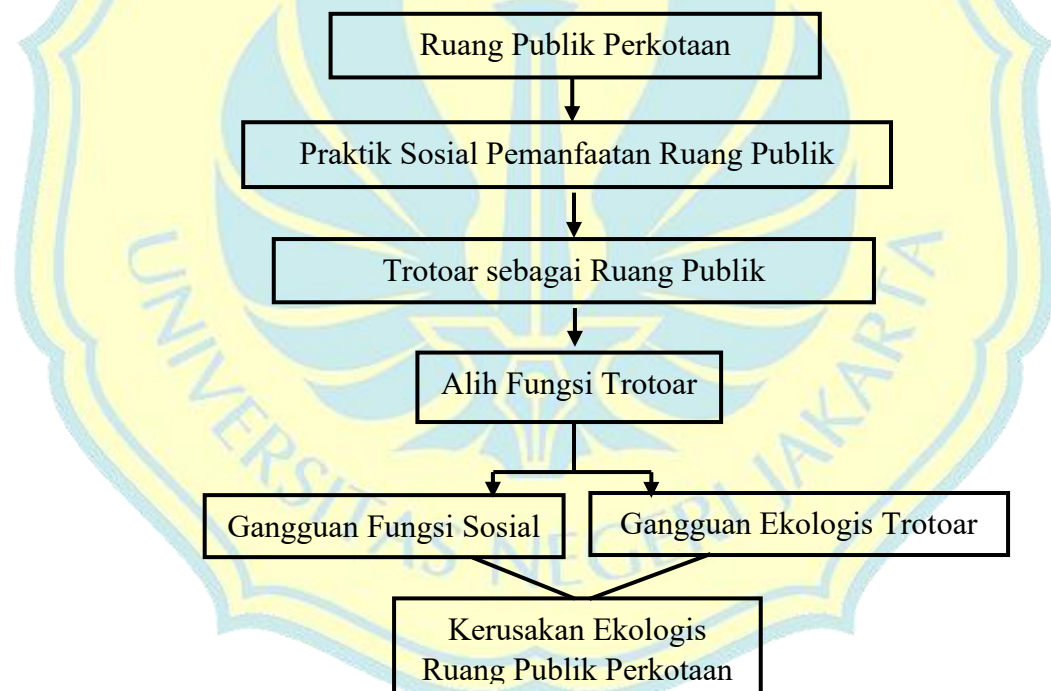
---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 67-70.

<sup>90</sup> Murray Bookchin, *Op. cit.*, hlm. 4-12.



Hubungan antar konsep dalam penelitian ini menunjukkan bahwa trotoar sebagai bagian dari ruang publik dapat mengalami perubahan fungsi akibat praktik sosial masyarakat dalam memanfaatkan ruang. Praktik sosial tersebut kemudian mendorong terjadinya alihfungsi trotoar yang berimplikasi pada menurunnya kualitas ekologis ruang publik perkotaan. Melalui kerangka hubungan antar konsep ini, penelitian berupaya menjelaskan bahwa fenomena alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah bukan hanya persoalan teknis kebersihan lingkungan, tetapi merupakan fenomena sosial yang berkaitan dengan dinamika pemanfaatan ruang publik dalam kehidupan masyarakat perkotaan.



**Skema 1. 3 Hubungan Antar Konsep**

Sumber: Analisis Peneliti, 2026

Skema hubungan antar konsep di atas menggambarkan alur keterkaitan antara ruang publik perkotaan, praktik sosial masyarakat, fungsi trotoar, hingga

dampak ekologis yang ditimbulkan. Pada tahap awal, penelitian ini memposisikan ruang publik perkotaan sebagai konteks utama tempat berbagai aktivitas sosial masyarakat berlangsung. Dalam perspektif teori ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas, ruang publik dipahami sebagai arena sosial yang memungkinkan masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, serta mengekspresikan kepentingan bersama dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dalam konteks kota modern, ruang publik tidak hanya mencakup taman atau alun-alun, tetapi juga berbagai infrastruktur perkotaan seperti jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya yang digunakan bersama oleh masyarakat.

Dalam skema tersebut, ruang publik perkotaan kemudian berhubungan dengan praktik sosial pemanfaatan ruang publik. Praktik sosial merujuk pada berbagai aktivitas keseharian masyarakat dalam menggunakan ruang kota sesuai dengan kebutuhan mereka. Penggunaan ruang publik sering kali bersifat fleksibel dan tidak selalu mengikuti fungsi normatif yang telah dirancang oleh perencana kota. Dalam kehidupan perkotaan yang kompleks, masyarakat, pedagang, pengguna jalan, maupun aktor sosial lainnya dapat memanfaatkan ruang publik dengan berbagai cara, seperti berdagang di trotoar, memarkir kendaraan, atau bahkan menjadikan ruang tertentu sebagai tempat pembuangan sampah. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa ruang publik merupakan ruang yang terus mengalami proses negosiasi sosial antara berbagai kepentingan masyarakat kota.

Dalam kerangka penelitian ini trotoar dipahami sebagai salah satu bentuk ruang publik perkotaan. Secara normatif, trotoar dirancang sebagai jalur khusus bagi pejalan kaki yang bertujuan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, serta

aksesibilitas mobilitas non-kendaraan di wilayah perkotaan. Selain fungsi mobilitas tersebut, trotoar juga memiliki fungsi sosial karena dapat menjadi ruang interaksi informal bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan perkotaan. Namun, dalam praktiknya, trotoar tidak selalu digunakan sesuai dengan fungsi awalnya. Tekanan aktivitas perkotaan yang tinggi sering kali menyebabkan trotoar dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan lain di luar fungsi utamanya.

Perubahan pola pemanfaatan tersebut kemudian mengarah pada alihfungsi trotoar. Alihfungsi terjadi ketika trotoar yang seharusnya digunakan sebagai jalur pejalan kaki berubah menjadi ruang bagi aktivitas lain, seperti tempat berdagang, parkir kendaraan, maupun tempat pembuangan sampah. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara fungsi ruang yang direncanakan dengan praktik penggunaan ruang yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, alihfungsi trotoar terutama terlihat dari pemanfaatannya sebagai tempat pembuangan sampah yang pada akhirnya memengaruhi kualitas ruang publik di kawasan perkotaan.

Alihfungsi trotoar tersebut kemudian menimbulkan gangguan terhadap fungsi sosial dan fungsi ekologis trotoar. Dari sisi sosial, keberadaan sampah di trotoar dapat menghambat mobilitas pejalan kaki, mengurangi kenyamanan ruang publik, serta menurunkan kualitas interaksi sosial di ruang kota. Sementara itu, dari sisi ekologis, penumpukan sampah di trotoar dapat mengganggu kebersihan lingkungan, menghambat sistem drainase, serta memperburuk kondisi lingkungan mikro perkotaan. Gangguan terhadap kedua fungsi ini menunjukkan bahwa

perubahan penggunaan ruang publik memiliki konsekuensi yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga ekologis.

Pada tahap akhir dalam skema tersebut, gangguan terhadap fungsi sosial dan ekologis trotoar bermuara pada kerusakan ekologis ruang publik perkotaan. Kerusakan ekologis ini tercermin dari menurunnya kualitas lingkungan, meningkatnya pencemaran, serta terganggunya fungsi ruang publik sebagai bagian dari sistem lingkungan kota. Dengan demikian, skema hubungan antar konsep ini menunjukkan bahwa fenomena alihfungsi trotoar tidak dapat dipahami sebagai persoalan kebersihan semata, melainkan sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antara ruang publik, praktik sosial masyarakat, serta dampak ekologis yang muncul dalam konteks kehidupan perkotaan.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Pendekatan dan Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, proses, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi terjadinya alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah di kawasan perkotaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena yang dikaji tidak dapat direduksi menjadi angka atau variabel terukur semata, melainkan memerlukan penelusuran terhadap praktik sosial, pemaknaan ruang, serta relasi antara kebijakan, masyarakat, dan lingkungan<sup>91</sup>. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak berorientasi pada

---

<sup>91</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Los Angeles: Sage Publications, 2014), hlm. 185-189.



generalisasi statistik, melainkan pada pemahaman kontekstual yang mendalam terhadap realitas sosial yang terjadi di lapangan<sup>92</sup>.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini tidak menggunakan perhitungan kuantitatif, tetapi menekankan pada pengumpulan data kualitatif, analisis data, serta interpretasi terhadap fenomena alihfungsi trotoar. Data yang diperoleh dipahami sebagai konstruksi sosial yang sarat makna, sehingga proses analisis dilakukan secara reflektif dan interpretatif<sup>93</sup>. Penelitian ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam mengamati, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai temuan empiris dengan kerangka konseptual dan teori yang digunakan<sup>94</sup>.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yakni dengan membangun pola, kategori, dan tema berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data mengenai kondisi trotoar, praktik pembuangan sampah, serta respons masyarakat dan aktor terkait<sup>95</sup>. Dari data tersebut, peneliti mengidentifikasi kecenderungan, keterulangan praktik, serta relasi antarfenomena yang kemudian dirumuskan menjadi tema-tema analitis. Setelah tema terbentuk, dilakukan proses deduktif dengan meninjau kembali data berdasarkan tema yang telah disusun untuk memastikan konsistensi temuan, menemukan data pendukung tambahan, serta menguji relevansi temuan dengan

---

<sup>92</sup> Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 5th ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018), hlm. 15-18.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 27-30.

<sup>94</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Los Angeles: Sage Publications, 2014), hlm. 69-72.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 86-90.

kerangka teori produksi ruang dan ekologi sosial yang digunakan dalam penelitian<sup>96</sup>.

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode studi kasus, dengan fokus pada kasus alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah di kawasan Jembatan Pelangi. Studi kasus dipilih karena metode ini memungkinkan penelitian untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam dan holistik dalam konteks kehidupan nyata<sup>97</sup>. Melalui studi kasus, penelitian ini tidak hanya memotret kondisi fisik trotoar, tetapi juga menelusuri proses sosial, kebijakan, dan praktik keseharian yang membentuk perubahan fungsi ruang tersebut.

Dalam metode studi kasus ini, alihfungsi trotoar dipahami sebagai sebuah fenomena yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara struktur kebijakan, praktik sosial masyarakat, serta dampak ekologis yang ditimbulkannya. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan kasus secara rinci, menelusuri faktor-faktor pendorong terjadinya alih fungsi, serta mengaitkannya dengan konsekuensi ekologis dan penurunan kualitas ruang publik perkotaan. Dengan demikian, metode studi kasus memungkinkan penelitian ini untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana dan mengapa trotoar kehilangan fungsi ekologis dan sosialnya dalam konteks perkotaan.

---

<sup>96</sup> Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Los Angeles: Sage Publications, 2018), hlm. 15-18.

<sup>97</sup> Ibid., hlm. 33-36.

### 1.7.2 Subjek dan Lokasi Penelitian

| No. | Informan | Usia     | Jenis Kelamin | Profesi          | Peran                       |
|-----|----------|----------|---------------|------------------|-----------------------------|
| 1.  | AY       | 52 tahun | Laki-laki     | Ketua RW 04      | Penanggung Jawab Wilayah    |
| 2.  | II       | 43 tahun | Laki-laki     | Ketua RW 05      | Penanggung Jawab Wilayah    |
| 3.  | S        | 45 tahun | Laki-laki     | Petugas PPSU     | Penanggung Jawab Wilayah    |
| 4.  | J        | 22 tahun | Perempuan     | Mahasiswa        | Masyarakat Pengguna Trotoar |
| 5.  | K        | 21 tahun | Perempuan     | Karyawan         | Masyarakat Pengguna Trotoar |
| 6.  | R        | 24 tahun | Laki-laki     | Mahasiswa        | Masyarakat Pengguna Trotoar |
| 7.  | BA       | 33 tahun | Perempuan     | Ibu Rumah Tangga | Masyarakat Pengguna Trotoar |
| 8.  | BD       | 34 tahun | Perempuan     | Ibu Rumah Tangga | Masyarakat Pengguna Trotoar |
| 9.  | W        | 22 tahun | Laki-laki     | Karyawan         | Masyarakat Pengguna Trotoar |

**Tabel 1. 2 Karakteristik Informan**

Sumber: Analisis Peneliti, 2026

Penelitian ini dilaksanakan di Trotoar kawasan Jembatan Pelangi yang terletak di Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada kondisi empiris di lapangan yang menunjukkan terjadinya alihfungsi trotoar dari jalur pejalan kaki menjadi tempat pembuangan sampah ilegal, baik yang bersifat sementara maupun semi permanen.

Fenomena tersebut menjadikan kawasan ini relevan untuk dikaji sebagai representasi permasalahan ruang publik perkotaan yang mengalami degradasi fungsi sekaligus kerusakan ekologis.

Secara spasial Trotoar Jembatan Pelangi berada pada kawasan dengan tingkat mobilitas dan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Trotoar pada lokasi ini secara normatif dirancang sebagai fasilitas pendukung mobilitas pejalan kaki yang aman dan nyaman<sup>98</sup>. Namun, dalam praktiknya, keberadaan tumpukan sampah rumah tangga telah menghambat fungsi dasar trotoar sebagai ruang publik. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara perencanaan ruang dan realitas pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat<sup>99</sup>. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan Jembatan Pelangi belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam program penataan dan pengelolaan ruang publik oleh pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan persampahan<sup>100</sup>. Keterbatasan fasilitas tempat pembuangan sampah di sekitar lokasi, lemahnya pengawasan, serta minimnya penegakan aturan menjadi faktor yang memperkuat praktik pembuangan sampah di trotoar. Situasi tersebut menjadikan kawasan ini sebagai lokasi strategis untuk mengkaji relasi antara tata kelola ruang, praktik sosial masyarakat, dan dampak ekologis yang ditimbulkan.

---

<sup>98</sup> Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan*, hlm. 5-8.

<sup>99</sup> Stephen Carr dkk., *Op. cit.*, hlm. 2.

<sup>100</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*, Pasal 12-13.



Kondisi ekologis trotoar di kawasan Jembatan Pelangi menunjukkan berbagai indikasi penurunan kualitas lingkungan, seperti penumpukan sampah organik dan anorganik, bau tidak sedap, serta potensi gangguan terhadap sistem drainase. Dampak-dampak tersebut tidak hanya memengaruhi kualitas ruang publik secara fisik, tetapi juga berkontribusi terhadap degradasi lingkungan perkotaan secara lebih luas. Oleh karena itu, lokasi ini dipandang relevan untuk menelaah bagaimana alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah berimplikasi pada kerusakan ekologis ruang publik. Dengan mempertimbangkan aspek lokasi, kondisi sosial, serta permasalahan ekologis yang terjadi, Trotoar di Kawasan Jembatan Pelangi ini dipilih sebagai studi kasus yang mampu memberikan gambaran konkret mengenai dinamika alihfungsi ruang publik di perkotaan. Lokasi ini memungkinkan penelitian untuk menggali secara mendalam proses, aktor, dan konsekuensi ekologis dari praktik pembuangan sampah di trotoar dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik wawancara mendalam dengan informan, observasi langsung untuk memahami kondisi di lapangan, serta analisis dokumen sebagai data pendukung. Proses pengambilan data dilakukan dengan memilih informan yang memiliki keterkaitan erat dengan data yang dibutuhkan, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai

suatu kasus<sup>101</sup>. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1.7.3.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai konsep ruang publik, alih fungsi trotoar, kerusakan ekologis, perilaku masyarakat perkotaan, serta pengelolaan sampah di kawasan perkotaan. Sumber kepustakaan yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga, serta berita dari media massa yang berkaitan dengan permasalahan penelitian<sup>102</sup>. sumber-sumber ini membantu dalam memahami konteks sosial dan pengalaman individu secara lebih mendalam<sup>103</sup>.

### 1.7.3.2 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung kondisi lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan kawasan Jembatan Pelangi, kondisi trotoar, aktivitas masyarakat, serta situasi lingkungan yang berkaitan dengan alih fungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data faktual mengenai kondisi fisik ruang publik, bentuk

---

<sup>101</sup> Creswell, J. W., & Creswell, J. D., (2018), *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approache*, Sage publications, hlm 298.

<sup>102</sup> *Ibid.* hlm 302.

<sup>103</sup> *Ibid.* hlm 255.

aktivitas masyarakat di sekitar kawasan, proses pembuangan sampah, hingga dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan pengguna trotoar. Selain itu, observasi juga digunakan untuk mencatat suasana lokasi penelitian, interaksi masyarakat, serta berbagai fenomena sosial yang terjadi secara langsung di lapangan sehingga dapat membantu peneliti memahami kondisi penelitian secara lebih mendalam<sup>104</sup>.

### **1.7.3.3 Wawancara Mendalam**

Wawancara digunakan sebagai metode untuk menghimpun berbagai jenis data yang beragam dari para informan dalam berbagai kondisi dan situasi. Penelitian ini menerapkan wawancara tidak terstruktur, yakni tanya jawab yang berlangsung dilakukan secara bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan rinci<sup>105</sup>. Pedoman yang digunakan berupa garis besar permasalahan yang akan dibahas, ini bertujuan adalah untuk menggali pandangan, pengalaman, dan opini dari informan secara mendalam<sup>106</sup>. Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan sifat yang fleksibel dan terbuka, tidak terikat pada struktur pertanyaan yang kaku, namun tetap diarahkan secara sistematis untuk menggali informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan alur pertanyaan sesuai dengan konteks jawaban informan, sehingga data yang diperoleh bersifat mendalam dan kontekstual. Informan juga diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan

---

<sup>104</sup> *Ibid.* hlm 307.

<sup>105</sup> *Ibid.* hlm 302.

<sup>106</sup> *Ibid* hlm 304.

pandangan, pengalaman, serta penilaian mereka secara bebas tanpa tekanan selama proses wawancara berlangsung.

Dalam penelitian ini, informan utama terdiri atas warga yang tinggal atau beraktivitas di sekitar kawasan Jembatan Pelangi, khususnya individu yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan trotoar yang mengalami alihfungsi sebagai tempat pembuangan sampah. Kelompok informan ini mencakup pejalan kaki, warga sekitar, serta pengguna jalan yang terdampak secara langsung oleh keberadaan sampah di trotoar. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman empiris mengenai perubahan fungsi trotoar dan dampak ekologis yang ditimbulkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan informan kunci, yaitu pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan ruang publik dan persampahan di kawasan tersebut, seperti petugas kebersihan lingkungan atau PPSU dan pengurus RW setempat. Kehadiran informan kunci ini penting untuk memperoleh perspektif struktural terkait kebijakan, sistem pengelolaan sampah, serta kendala yang dihadapi dalam menjaga fungsi trotoar sebagai ruang publik.

Proses wawancara dilakukan secara tatap muka di sekitar lokasi penelitian, yakni di kawasan Trotoar Jembatan Pelangi, Jakarta Barat dan juga di area sekitar pemukiman penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Pemilihan lokasi wawancara ini bertujuan agar informan dapat merefleksikan pengalaman dan pandangannya secara langsung berdasarkan kondisi ruang yang sedang diamati. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bersifat naratif, tetapi juga kontekstual dan terikat pada realitas ruang publik yang menjadi objek penelitian.



#### 1.7.4 Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan, menyusun, menafsirkan, dan mengolah data secara sistematis sehingga menghasilkan informasi yang bermakna sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai. Analisis dilakukan melalui empat komponen yang saling berhubungan dan berlangsung secara interaktif, yaitu pengumpulan data (*data collection*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusions drawing/verification*), dan kondensasi data (*data condensation*)<sup>107</sup>. Keempat komponen tersebut tidak berjalan secara linier, melainkan saling memengaruhi selama proses penelitian sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Adapun tahapan analisis data tersebut dijelaskan sebagai berikut.

##### a) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan informan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan kondisi trotoar di kawasan Jembatan Pelangi. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan alihfungsi trotoar, bentuk kerusakan ekologis yang terjadi, serta dampaknya terhadap kualitas ruang publik.

---

<sup>107</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020), hlm. 8-12.

#### b) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyajikan data secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti. Penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang didukung oleh tabel, matriks, gambar, maupun bagan. Penyajian data bertujuan untuk memperlihatkan hubungan antar temuan sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, tema, maupun keterkaitan antar data sebelum dilakukan penarikan kesimpulan.

#### c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusions Drawing/Verification*)

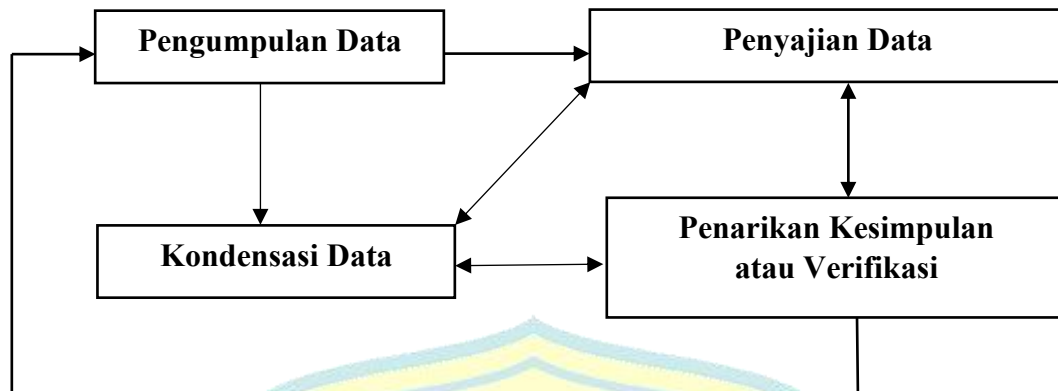
Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak diperoleh secara langsung, tetapi dibangun melalui proses interpretasi terhadap data yang telah disajikan. Selama proses penelitian berlangsung, kesimpulan terus diverifikasi dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar tetap konsisten dengan data yang ditemukan di lapangan. Melalui proses tersebut, peneliti dapat memperoleh temuan yang valid mengenai fenomena alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah ilegal di kawasan Jembatan Pelangi.

#### d) Kondensasi Data (*Data Condensation*)

*Data Condensation* merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, mengodekan, mengelompokkan, dan mentransformasikan data agar menjadi bermakna. Pada tahap ini peneliti menyeleksi seluruh data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian memfokuskan data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya data dikelompokkan ke dalam beberapa

tema, seperti faktor-faktor yang mendorong terjadinya alihfungsi trotoar, bentuk kerusakan ekologis yang ditimbulkan, dampak terhadap kualitas ruang publik, serta hubungan antara perilaku masyarakat, ruang publik, dan lingkungan perkotaan. Proses kondensasi dilakukan agar data yang dianalisis lebih terarah, terorganisasi, dan tetap mempertahankan makna dari informasi yang diperoleh di lapangan.

Untuk menganalisis hasil penelitian mengenai kerusakan ekologis ruang publik trotoar di kawasan Jembatan Pelangi, Jakarta Barat, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji, menggambarkan, dan menginterpretasikan berbagai fenomena yang berkaitan dengan alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah ilegal berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa hasil pengamatan lapangan, pendapat informan, serta berbagai dokumen pendukung yang menggambarkan kondisi ruang publik, perilaku masyarakat, dan dampak ekologis yang terjadi. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan agar peneliti dapat memberikan gambaran secara mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alihfungsi trotoar, bentuk kerusakan ekologis yang muncul, serta dampaknya terhadap kualitas ruang publik di kawasan Jembatan Pelangi.



Sumber: Analisis Peneliti, (2026)

Proses analisis dilakukan melalui empat tahapan yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi, dan kondensasi data. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menghimpun berbagai informasi mengenai kondisi fisik trotoar, perilaku masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik, ketersediaan fasilitas persampahan, serta sistem pengelolaan ruang publik di kawasan penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan skema untuk memudahkan identifikasi pola-pola yang muncul dalam penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berulang dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh temuan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap kondensasi data dilakukan sepanjang proses penelitian dengan memilih, memfokuskan, mengelompokkan, dan menyederhanakan data sesuai fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data ke dalam tema-tema seperti faktor penyebab alihfungsi trotoar, kerusakan ekologis yang ditimbulkan, penurunan kualitas ruang publik, serta relasi antara manusia, ruang publik, dan



lingkungan perkotaan berdasarkan perspektif Teori Ruang Publik Jürgen Habermas dan Teori Ekologi Sosial Murray Bookchin. Melalui proses analisis tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena alihfungsi trotoar di kawasan Jembatan Pelangi sekaligus menjelaskan hubungan antara perilaku masyarakat, pengelolaan ruang publik, dan keberlanjutan lingkungan perkotaan.

#### **1.7.5 Peran Peneliti**

Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian yang terlibat secara langsung dalam keseluruhan proses pengumpulan dan analisis data. Peneliti tidak hanya berfungsi sebagai pengamat pasif, tetapi juga sebagai pengamat partisipatif yang hadir di lapangan untuk memahami secara mendalam fenomena alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah dan dampak ekologis yang ditimbulkannya di kawasan Jembatan Pelangi, Jakarta Barat. Peran peneliti mencakup kegiatan mengamati kondisi fisik trotoar, pola pembuangan sampah, serta interaksi masyarakat dengan ruang trotoar yang telah mengalami perubahan fungsi. Melalui observasi langsung, peneliti berupaya menangkap dinamika penggunaan ruang publik secara aktual, termasuk bentuk-bentuk praktik keseharian masyarakat yang berkontribusi terhadap terjadinya alihfungsi trotoar.

Peneliti juga berperan dalam mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan informan utama, yaitu pemerintah setempat, warga dan pengguna trotoar di sekitar Jembatan Pelangi, serta informan kunci seperti petugas kebersihan lingkungan dan aparat setempat yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan ruang publik dan persampahan. Dalam proses ini, peneliti bertanggung

jawab membangun hubungan yang terbuka dan etis dengan informan agar data yang diperoleh mencerminkan pengalaman, pandangan, dan makna yang mereka berikan terhadap kondisi trotoar. Selanjutnya, peneliti berperan dalam menganalisis dan menafsirkan data yang diperoleh dengan menggunakan kerangka konseptual dan teori yang relevan, khususnya Teori Ruang Publik oleh Habermas dan Teori Ekologi Sosial oleh Bookchin. Analisis dilakukan secara reflektif dengan memperhatikan konteks sosial, struktural, dan ekologis yang melingkupi fenomena alihfungsi trotoar.

Dengan peran tersebut, peneliti berupaya menjaga objektivitas, sensitivitas sosial, serta konsistensi metodologis selama proses penelitian berlangsung. Kehadiran peneliti di lapangan tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan data, tetapi juga untuk memahami secara komprehensif relasi antara manusia, ruang publik, dan lingkungan perkotaan dalam konteks kerusakan ekologis akibat alihfungsi trotoar.

#### **1.7.6 Triangulasi Data**

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan dan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Triangulasi dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak bersifat sepihak, melainkan mencerminkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan secara lebih komprehensif.

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari warga sekitar dan pengguna trotoar di kawasan Jembatan

Pelangi, petugas kebersihan lingkungan, serta aparat atau pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan ruang publik dan persampahan setempat. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian maupun perbedaan pandangan terkait praktik pembuangan sampah di trotoar, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta dampak ekologis yang dirasakan. Selain triangulasi sumber, peneliti juga menerapkan triangulasi metode dengan mengombinasikan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi visual berupa foto kondisi trotoar. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung perubahan fungsi trotoar dan dampak ekologis yang tampak, sementara wawancara berfungsi untuk menggali makna, pengalaman, dan persepsi informan terhadap fenomena tersebut. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan empiris.

Peneliti juga mencermati konsistensi narasi antar informan dengan menelaah kesamaan pola cerita, pengalaman, dan penjelasan yang disampaikan. Ketika ditemukan perbedaan informasi, peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut melalui wawancara tambahan atau observasi ulang untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Melalui penerapan triangulasi data ini, diharapkan hasil penelitian mampu menggambarkan fenomena alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah secara akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta memberikan pemahaman yang utuh mengenai dampak ekologisnya terhadap ruang publik perkotaan.

## 1.8 Sistematika Penelitian

Struktur penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ketiga bagian tersebut dijabarkan dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, meliputi Bab I sebagai pendahuluan, Bab II dan Bab III yang berisikan temuan hasil penelitian, Bab IV yang membahas analisis hasil temuan, serta Bab V sebagai bagian penutup. Penyusunan penelitian ini dilakukan secara terstruktur yang berdasarkan pada data lapangan serta analisis konsep yang telah dilakukan..

**BAB I**, Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena kerusakan ekologis ruang publik perkotaan akibat alihfungsi trotoar sebagai tempat pembuangan sampah. Pembahasan diawali dari konteks umum ruang publik dan peran ekologisnya di wilayah perkotaan, kemudian mengerucut pada kasus spesifik trotoar di Jembatan Pelangi, Jakarta Barat. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka konseptual, serta landasan teori yang digunakan, yaitu Teori Ruang Publik Jürgen Habermas dan Teori Ekologi Sosial oleh Murray Bookchin. Pada bagian akhir, dijelaskan pula metode penelitian dan sistematika penelitian sebagai panduan keseluruhan penelitian.

**BAB II**, Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai konteks sosial wilayah penelitian yang melatarbelakangi terjadinya fenomena alihfungsi trotoar. Pembahasan dalam bab ini meliputi gambaran umum wilayah Kalideres dan trotoar Jembatan Pelangi, proses sosial terbentuknya TPS ilegal di trotoar, kondisi lingkungan dan karakteristik sampah yang ditemukan, serta dinamika



pemanfaatan trotoar oleh masyarakat. Selain itu, bab ini juga menguraikan dampak awal terhadap lingkungan dan masyarakat sebagai bentuk konsekuensi dari perubahan fungsi ruang publik tersebut, serta profil pengguna ruang publik trotoar sebagai aktor yang terlibat dalam fenomena yang diteliti.

**BAB III**, Bab ini berisi pemaparan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Dalam bab ini, peneliti menyajikan data empiris yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait faktor-faktor yang mendorong terjadinya alihfungsi trotoar, gambaran kerusakan ekologis yang muncul, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas ruang publik di kawasan Jembatan Pelangi. Data tersebut disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran nyata mengenai fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

**BAB IV**, Bab ini berfungsi untuk menganalisis hasil temuan penelitian dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data empiris yang diperoleh di lapangan dengan Teori Ruang Publik Jürgen Habermas dan Teori Ekologi Sosial Murray Bookchin. Melalui analisis ini, peneliti menjelaskan bagaimana praktik sosial masyarakat dalam memanfaatkan trotoar berkontribusi terhadap perubahan fungsi ruang publik serta menimbulkan dampak ekologis di kawasan perkotaan.

**BAB V**, sebagai bagian penutup yang terdiri dari dua aspek utama, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat rangkuman hasil penelitian yang telah dibahas, serta saran yang ditujukan bagi pemerintah